

**PERANAN GEREJA DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA  
JEMAAT DI TENGAH MASYARAKAT PLURALISME**

(Studi Kasus Jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

**Natanael Sitinjak**  
**2213032065**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**PERANAN GEREJA DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA  
JEMAAT DI TENGAH MASYARAKAT PLURALISME**  
(Studi Kasus Jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur)

Oleh:

Natanael Sitinjak

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi dalam aspek budaya, suku, agama, dan bahasa. Kondisi plural ini menjadi kekayaan sosial sekaligus tantangan, seperti potensi konflik, intoleransi, dan melemahnya persatuan. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan nasional. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, penguatan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya mengakar, termasuk di lingkungan lembaga keagamaan.

Gereja memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral, spiritual, dan kebangsaan kepada jemaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur, dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat plural.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPdI *El-Shaddai* berperan sebagai agen transformasi sosial dengan mengintegrasikan ajaran Kristiani dan nilai Pancasila melalui khotbah, pendidikan iman, kegiatan sosial, serta kerja sama lintas agama, sehingga membentuk jemaat yang toleran, nasionalis, dan bertanggung jawab sosial.

**Kata kunci:** Gereja, Pancasila, pluralisme, Toleransi, Nasionalisme, Transformasi sosial.

**THE ROLE OF THE CHURCH IN STRENGTHENING PANCASILA VALUES  
AMONG CONGREGATIONS WITHIN  
A PLURALISTIC SOCIETY**

*(A Case Study of the Congregation at GPdI El-Shaddai Purbolinggo, East Lampung)*

By

Natanael Sitinjak

**ABSTRACT**

Indonesia was a country with a high level of diversity in terms of culture, ethnicity, religion, and language. This plural condition was both a social asset and a challenge, as it could give rise to potential conflicts, intolerance, and the weakening of national unity. Pancasila played a crucial role as the state foundation and national ideology that served as a guideline for maintaining harmony and national integrity. However, in the era of globalization and digitalization, the internalization of Pancasila values had not yet been fully realized, including within religious institutions. The Church had a strategic role in instilling moral, spiritual, and national values among its congregants. This study aimed to analyze the role of the Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur, in strengthening Pancasila values within a pluralistic society. The research employed a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicated that GPdI El-Shaddai functioned as an agent of social transformation by integrating Christian teachings with Pancasila values through sermons, faith education, social activities, and interfaith cooperation, thereby shaping congregants who were tolerant, nationalistic, and socially responsible.

**Keywords:** Church, Pancasila, pluralism, Tolerance, Nationalism, Social transformation.

**PERANAN GEREJA DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA  
JEMAAT DI TENGAH MASYARAKAT PLURALISME**

(Studi Kasus Jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur)

**Oleh:**

**NatanaelSitinjak**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : PERANAN GEREJA DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA JEMAAT DITENGAH MASYARAKAT PLURALISME

Nama Mahasiswa : *Natanael Sitinjak*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2213032065

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

*Ana Mentari*  
Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.  
NIP 199211122019032026

Pembimbing II,

*Edi Siswanto*  
Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198403092025211055

1. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

*Dr. Dedy Miswar*  
Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.  
NIP 197411082005011003

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

*Dr. Yulisca Nurmalisa*  
Dr. Yulisca Nurmalisa., M.Pd.  
NIP 198706022008122001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris : Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. M. Mona Adha, M.Pd.



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.  
NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Mei 2026

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Natanael Sitinjak  
NPM : 2213032065  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Dusun II RT 004 RW 002 Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo  
Kab. Lampung Timur Prov. Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

**Bandar Lampung, 04 April 2026**

  
**Natanael Sitinjak**  
**NPM 2213032065**

## RIWAYAT HIDUP



Natanael Sitinjak merupakan nama lengkap dari penulis lahir di Teluk Betung pada 08 Juni 2004 sebagai anak semata wayang yang merupakan bentuk cinta kasih dari pasangan Bapak Labinsar Sitinjak dan Ibu Resiana Salduna.

Penulis menghabiskan masa kecilnya di Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan memulai pendidikan di SD Negeri 2 Taman Fajar ( Lulus pada tahun 2016 ), lalu melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Way Bungur ( lulus pada tahun 2019 ), dan menempuh Pendidikan di SMA Negeri 1 Purbolinggo (lulus pada tahun 2022). Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur UTBKSBMPTN. Semasa menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi kampus tingkat prodi yaitu Fordika dan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen.

Pada juli 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Lampung-Solo-Yogyakarta-Jakarta-Lampung. Kemudian penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung periode 1 pada bulan januari sampai dengan Februari tahun 2025 yang dilaksanakan di Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, serta melaksanakan Program Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 1 Wono Agung, yang memberikan pengalaman langsung dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan kelas.

## **MOTTO**

“Aku bertahan bukan karena kuat, tapi karena masa depanku layak diperjuangkan.” (Natanael Sitinjak)

“Nilai Kejujuran lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Doa” (Papi Natan)

“Tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu.”  
(Mami Natan)

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap syukur yang tidak pernah ada habisnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga selalu adanya petunjuk, kemudahan serta kelancaran dalam membimbing diri ini dalam proses menimba ilmu dan mencari jati diri.*

*Goresan tinta dalam karya ini kupersembahkan teruntuk kedua orang tuaku yang merupakan manifestasi Tuhan paling nyata di dunia ini. Terimakasih atas segala kasih sayang yang selalu mengiringi langkah demi langkah yang ditempuh putra kecilmu ini, Kesabaran, kekuatan, keikhlasan, serta untaian doa yang tiada hentinya dibisikkan pada setiap cakupan tanganmu supaya putramu bisa berdiri dengan kokoh dengan kakinya sendiri dalam menghadapi berbagai rasa dalam cerita di dunianya.*

*Harta yang paling berharga, adalah keluarga benar adanya. Papi dan Mamiku menjadi penopang diri ini dengan segala motivasinya yang membuka pikiran yang jauh lebih dewasa dalam melihat setiap permasalahan. Terimakasih telah mengajarkan untuk menilai serta memahami segala hal yang terjadi tidak dengan menggunakan satu sudut pandang saja yang membuat terbukanya pemikiran yang dewasa*

*Serta*

*Almamaterku Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Gereja dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada Jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, bantuan baik secara moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
6. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing I. Terima kasih telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd, selaku Pembahas I. Terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd, selaku Pembahas II. Terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran dan segala bantuan yang telah diberikan.
11. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak Labinsar Sitinjak dan ibu Resiana Salduna terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perjuangan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menguatkan di setiap langkah, memberikan semangat, dan tidak pernah lelah mendoakan.
13. Teruntuk mahasiswi kesmas unmal dengan NPM 22410047 yang hadir dalam perjalanan ini sebagai pendamping dan support sistem. Terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kesabarannya dalam menemani setiap proses, baik pada saat penulis merasa yakin maupun ketika keraguan sempat hadir. Kehadirannya menjadi energi baik yang membuat penulis mampu tetap melangkah dengan hati yang mantap. Doa, kontribusi, serta kebaikan yang diberikan menjadi bagian berarti dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita berjodoh dan terus bersama.
14. Teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui selama 4 tahun ini, baik dalam keadaan sedih maupun senang.

Banyak hal yang mungkin tidak bisa tertuangkan melalui tulisan maupun kata-kata untuk mewakili banyaknya rasa bersyukur atas bertemunya dengan kalian. Senang bisa belajar bersama kalian.

15. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Penulis

**Natanael Sitinjak**  
**NPM. 2213032065**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Gereja dalam Penguatan Nilai-Nilai Pancasila kepada Jemaat di Tengah Masyarakat Pluralisme (Studi Kasus Jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo)” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik untuk menganalisis secara mendalam peran institusi keagamaan, dalam hal ini Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada jemaatnya. Di tengah dinamika masyarakat yang plural secara agama, budaya, dan sosial, gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membentuk karakter umat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, keadilan sosial, serta cinta terhadap tanah air.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi teknik penulisan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat saya harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sosial-keagamaan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran lembaga keagamaan dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Bandar Lampung, 03 Juni  
2025 Penulis

Natanael Sitinjak

NPM.2213032065

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Pembatasan Penelitian.....	8
D. Pertanyaan Penelitian .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	11

2. Subjek Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian .....	12
4. Lokasi Penelitian .....	12
5. Waktu Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teori .....	13
1. Tinjauan tentang Peranan Gereja .....	13
a. Pengertian Peran .....	13
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran.....	17
c. Pengertian Gereja.....	22
d. Sejarah Gereja.....	26
e. Pengertian Jemaat .....	32
f. Pengertian Masyarakat .....	37
2. Tinjauan Tentang Nilai-nilai Pancasila.....	42
a. Pengertian Nilai.....	42
b. Karakteristik Nilai.....	47
c. Pengertian Pancasila .....	52
d. Sejarah Pancasila.....	57
e. Nilai Filosofis yang Terkandung dalam Pancasila .....	60
B. Menurut Para Tokoh Ahli .....	64
C. Kerangka Berpikir .....	86
D. Kajian Penelitian yang Relevan.....	88
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>91</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	91
B. Informan dan Unit .....	92
C. Jenis Data .....	92
1. Data Primer .....	92
2. Data Sekunder .....	93

D. Teknik Pengumpulan Data .....	93
1. Wawancara .....	93
2. Observasi .....	94
3. Dokumentasi .....	94
E. Uji Kredibilitas Data .....	95
1. Credibility Kriteria .....	95
F. Teknik Pengolahan Data .....	97
1. Tahap Editing .....	98
2. Tahap Interpretasi .....	98
G. Teknik Analisis Data .....	98
1. Reduksi Data .....	99
2. Penyajian Data (Display Data) .....	99
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) .....	99
H. Rencana Penelitian .....	101
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>102</b>
A. Langkah-langkah Penelitian .....	102
1. Persiapan Pengajuan Judul .....	102
2. Penelitian Pendahuluan .....	102
3. Pengajuan Rencana Penelitian .....	103
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....	103
5. Pelaksanaan Penelitian .....	104
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	104
1. Sejarah singkat GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo Lampung Timur .....	104
2. Visi Misi GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo Lmapung Timur .....	108
3. Profil GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo lampung Timur .....	111
4. Letak Administrasi .....	113
5. Luas Wilayah GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo .....	113

6. Keadaan Jemaat GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo.....	113
7. Keadaan Jemaat Menurut Tingkat Pendidikan.....	113
8. Keadaan Jemaat Menurut Jenis Pekerjaan.....	114
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	115
1. Paparan Data.....	115
D. Pembahasan .....	154
1. Peranan Gereja .....	155
2. Nilai-nilai Pancasila.....	155
E. Temuan Penelitian.....	160
F. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	167
G. Keunikan Penelitian.....	172
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>177</b>
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran.....	180

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 1</b> Struktur GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo Lampung Timur .....	112
<b>Tabel 2</b> KK jemaat GPdI <i>El-Shaddai</i> .....	112
<b>Tabel 3</b> Tingkat Pendidikan Jemaat GPdI <i>El-Shaddai</i> .....	113
<b>Tabel 4</b> Daftar Jemaat GPdI <i>El-Shaddai</i> berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	114

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> Kerangka Berpikir .....	87
<b>Gambar 2</b> Analisis Data Model Interaktif.....	98
<b>Gambar 3</b> Rencana Penelitian.....	101
<b>Gambar 4</b> GPdI <i>El-Shaddai</i> Purbolinggo Lampung Timur.....	104
<b>Gambar 5</b> Foto Bersama Pendeta dan Jemaat GPdI <i>El-Shaddai</i> .....	111
<b>Gambar 6</b> Pelayanan Mingguan oleh Pendeta .....	119
<b>Gambar 7</b> Foto Pelayanan mingguan Pendeta dan Jemaat .....	122
<b>Gambar 8</b> Foto sedang Berlangsungnya Pendidikan Iman.....	124
<b>Gambar 9</b> Foto Wawancara dengan Pendeta .....	127
<b>Gambar 10</b> Foto bersama perwakilan Masyarakat.....	130
<b>Gambar 11</b> Wawancara dengan Sekretaris Desa .....	132
<b>Gambar 12</b> Ibadah pendalaman Alkitab di Gereja .....	136
<b>Gambar 13</b> Wawancara bersama RT .....	138
<b>Gambar 14</b> Foto kunjungan Gereja ke Masyarakat .....	141
<b>Gambar 15</b> Foto kegiatan musyawarah Gereja.....	143
<b>Gambar 16</b> Foto wawancara bersama Masyarakat sekitar Gereja.....	145
<b>Gambar 17</b> Foto wawancara bersama Jemaat.....	147
<b>Gambar 18</b> Foto wawancara bersama Pendeta .....	148
<b>Gambar 19</b> Foto wawancara bersama Jemaat.....	150
<b>Gambar 20</b> Foto Jemaat usai musyawarah .....	151
<b>Gambar 21</b> Foto wawancara bersama Jemaat.....	153

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Surat Penelitian Pendahuluan

**Lampiran 2** Surat Balasan Izin Penelitian Pendahuluan

**Lampiran 3** Surat Izin Penelitian

**Lampiran 4** Surat Balasan Penelitian

**Lampiran 5** Surat Balasan Penelitian dari Desa Taman Fajar

**Lampiran 6** Pedoman Wawancara

**Lampiran 7** Pedoman Observasi

**Lampiran 8** Pedoman Dokumentasi

**Lampiran 9** Wawancara dengan Narasumber

**Lampiran 10** Observasi kegiatan GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo

**Lampiran 11** Dokumentasi Arsip Gereja

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, dengan lebih dari 700 bahasa daerah, serta enam agama resmi yang diakui negara. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unik, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam masyarakat yang majemuk ini, perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya sangat rentan menimbulkan konflik horizontal, seperti yang terlihat dalam berbagai peristiwa intoleransi yang masih terjadi di berbagai daerah. Menurut Laporan Setara Institute 2024, terdapat 180 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), yang menunjukkan bahwa tantangan pluralisme masih nyata di Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang menjadi pedoman hidup dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia (Simandjuntak, 2021). Nilai-nilainya menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif negara, tetapi juga menjadi fondasi etik dan moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang membawa berbagai pengaruh ideologis dari luar, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin mendesak (Prasetyo & Suyahmo, 2022). Hal ini diperkuat dengan hasil Survei Nasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2023, yang menunjukkan

bahwa hanya 63,5% generasi muda yang memahami isi dan makna Pancasila secara utuh. Ini menandakan bahwa nilai-nilai dasar negara belum sepenuhnya mengakar pada generasi muda. Implementasi Pancasila tidak cukup hanya dalam tataran wacana atau pendidikan formal, tetapi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan.

Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unik, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam masyarakat yang majemuk ini, perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya sangat rentan menimbulkan konflik horizontal apabila tidak ada nilai pemersatu yang kokoh. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang menjadi pedoman hidup dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia (Simandjuntak, 2021). Nilai-nilainya menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan.

Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif negara, tetapi juga menjadi fondasi etik dan moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang membawa berbagai pengaruh ideologis dari luar, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin mendesak (Prasetyo & Suyahmo, 2022). Implementasi Pancasila tidak cukup hanya dalam tataran wacana atau pendidikan formal, tetapi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan. Pancasila mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Setiap sila mengandung makna mendalam dalam membangun karakter bangsa. Nilai-nilai ini relevan dengan kehidupan masyarakat yang majemuk. Implementasi Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari (Adha et al., 2020).

Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada jemaatnya. Lebih dari sekadar tempat ibadah, gereja berfungsi sebagai pusat pendidikan karakter, tempat pembentukan kepribadian, dan agen transformasi sosial. Ajaran-ajaran kekristenan seperti kasih, pengampunan, perdamaian, dan keadilan sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila (Siburian & Tambunan, 2023). Gereja memiliki otoritas moral dan kedekatan emosional dengan jemaat, sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan kebangsaan secara efektif dan kontekstual.

Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen. Gereja juga menjadi pusat pembentukan karakter dan moral jemaat (Mentari et al., 2021). Ajaran gereja mengarahkan umat kepada kebaikan, kejujuran, kasih, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Gereja memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku umat. Keberadaan gereja memberi kontribusi pada kehidupan sosial masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi konteks yang harus diperhatikan oleh gereja. Gereja tidak dapat hidup dalam ruang yang *eksklusif* dan terpisah dari realitas sosial. Perbedaan agama dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Kehidupan bersama di tengah *pluralisme* menuntut gereja mengembangkan sikap toleran. Jemaat harus dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya hidup rukun dan damai (Adha et al., 2021).

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk menjalin relasi yang harmonis. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur, menjadi contoh nyata dari peran gereja dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat plural. Lingkungan sosial GPdI *El-Shaddai* mencerminkan miniatur Indonesia, di mana jemaat dan masyarakat sekitar terdiri dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan agama (Wahyuni, 2024). Pluralitas ini membutuhkan nilai pemersatu agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo berada dalam lingkungan masyarakat

yang plural. Jemaat berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Masyarakat di sekitarnya juga terdiri dari pemeluk agama yang berbeda. Interaksi sosial yang terjadi membutuhkan nilai kebangsaan yang kuat (Simandjuntak, 2021). Gereja memegang peran strategis dalam menciptakan keharmonisan di tengah perbedaan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman yang diajarkan dalam setiap pelayanan. Kegiatan gereja meliputi ibadah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Setiap kegiatan dirancang untuk membentuk karakter jemaat yang berintegritas, berlandaskan pada nilai kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Siburian & Tambunan, 2023). Jemaat diajak untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan sikap saling menghargai menjadi salah satu fokus utama gereja. Kehadiran gereja menjadi perekat dalam kehidupan sosial.

Khotbah yang disampaikan tidak hanya membahas aspek teologis, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan kebangsaan yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang Pancasila dipadukan dengan ajaran kasih Kristiani, menjadikan gereja sebagai agen integratif dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan (Tobing & Hutagalung, 2020). Gereja memotivasi jemaat untuk menjadi warga negara yang baik, karena tanggung jawab sosial merupakan bagian dari iman yang hidup. Nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas berjalan seiring, menunjukkan bahwa iman Kristen dapat bersinergi dengan semangat kebangsaan. Pendidikan iman yang diberikan bersifat kontekstual dan aplikatif, membentuk pola pikir kritis dalam diri jemaat agar mampu bertindak bijak di tengah masyarakat plural (Setiawan & Dewi, 2021). Pemahaman tentang toleransi dan keberagaman ditekankan secara intensif melalui berbagai pendekatan edukatif. Nilai-nilai Pancasila diperkenalkan sejak usia dini melalui sekolah minggu, sementara remaja dan pemuda dilibatkan dalam diskusi-diskusi tematik seputar keindonesiaan dan toleransi (Nugroho, 2023).

GPdI *El-Shaddai* secara aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program pelayanan, baik dalam bentuk ibadah, pendidikan iman,

kegiatan sosial, maupun kerja sama lintas agama. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kasih sayang, gotong royong, dan toleransi diwujudkan dalam tindakan nyata jemaat sehari-hari. Sekolah minggu, pertemuan remaja, serta diskusi pemuda menjadi sarana pendidikan informal yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini (Tobing & Hutagalung, 2020). Dalam khotbah dan bimbingan rohani, pemimpin gereja mengaitkan ajaran Alkitab dengan persoalan-persoalan kebangsaan seperti pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. GPdI *El-Shaddai* tidak hanya fokus pada aspek internal gereja.

Gereja juga membangun relasi dengan tokoh lintas agama dan masyarakat sekitar. Program sosial dilakukan secara *inklusif* tanpa melihat perbedaan latar belakang. Gereja ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan yang bersifat lintas iman. Nilai persatuan dan *solidaritas* terus ditumbuhkan dalam pelayanan. Kehadiran gereja menjadi simbol perdamaian di lingkungan sekitar. Penanaman nilai Pancasila bukanlah tugas instan yang selesai dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan pendekatan yang konsisten dan menyentuh hati jemaat. Gereja memiliki peran jangka panjang dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Pendidikan, keteladanan, dan komunikasi menjadi sarana utama dalam proses tersebut. Setiap elemen gereja harus terlibat secara aktif dan bertanggung jawab.

Gereja dan Pancasila bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan. Jemaat yang memahami Pancasila akan memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Mereka akan mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama warga bangsa. Kehidupan iman mereka tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai warga negara (Halim et al., 2019). Nilai-nilai kasih Kristus diterjemahkan dalam tindakan sosial yang nyata. Gereja menjadi agen *transformasi* sosial dan penjaga nilai kebangsaan. Pengaruh gereja menjangkau hingga ke tataran masyarakat luas. Penelitian ini akan mengkaji peran GPdI *El-Shaddai* dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada jemaatnya. Fokus utama terletak pada strategi, pendekatan, dan dampak dari upaya tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan gereja.

Hasil penelitian diharapkan menjadi contoh bagi gereja-gereja lainnya di Indonesia. Peranan gereja sangat dibutuhkan dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah *pluralisme*. Selain itu, pendekatan gereja dalam membina jemaat bersifat kontekstual dan aplikatif.

Gereja tidak hanya mengajarkan dogma, tetapi mengintegrasikannya dengan realitas sosial. Misalnya, konsep kasih terhadap sesama yang diajarkan dalam Injil diterjemahkan menjadi bentuk kepedulian sosial dan keterlibatan aktif dalam kegiatan lintas iman. Gereja juga menjalin relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama lain dalam rangka membangun solidaritas sosial (Wahyuni, 2024).

Peranan gereja dalam membangun kesadaran kebangsaan sangat penting di tengah meningkatnya fenomena intoleransi dan radikalisme. Beberapa studi menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat terkait isu kebangsaan (Setiawan & Dewi, 2021). Dalam hal ini, gereja menjadi garda depan dalam menangkal ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan iman yang diberikan oleh gereja tidak hanya berorientasi pada kehidupan rohani individu, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang bertanggung jawab dan cinta tanah air. Gereja juga dituntut untuk hadir dalam ruang- ruang digital sebagai respon terhadap perubahan zaman. Media sosial, video daring, dan aplikasi rohani menjadi sarana strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi, gereja harus mampu membangun narasi kebangsaan yang positif dan konstruktif (Nugroho, 2023).

Peranan gereja dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan bukanlah fenomena baru, tetapi menjadi semakin penting dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Tantangan terhadap persatuan bangsa tidak hanya berasal dari perbedaan yang ada, tetapi juga dari meningkatnya *intoleransi*, *radikalisme*, dan *polarisasi* sosial (Edi et al., 2014). Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga keagamaan dituntut untuk tampil sebagai penjaga moral dan pendorong perdamaian. Gereja, sebagai bagian dari institusi keagamaan, memiliki tanggung jawab moral dan

spiritual untuk menanamkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo menunjukkan bahwa gereja dapat mengambil peran aktif dalam membentuk masyarakat yang toleran dan nasionalis. Melalui pendekatan yang kontekstual, gereja mampu menyampaikan pesan-pesan Pancasila dalam bahasa yang dipahami jemaat. Hal ini terlihat dari upaya gereja dalam menyelaraskan ajaran Alkitab dengan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, kasih terhadap sesama yang diajarkan dalam kekristenan dapat diterjemahkan menjadi semangat persatuan dalam keberagaman, serta dorongan untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih dari itu, gereja memiliki potensi besar dalam membentuk opini dan perilaku sosial jemaat. Dengan kekuatan spiritual dan kharisma para pemimpin rohani, gereja dapat menjadi pengarah moral yang efektif. Ketika nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan ajaran iman yang diyakini jemaat, maka penyampaian nilai-nilai tersebut menjadi lebih bermakna dan menyentuh. Inilah yang membedakan peran gereja dengan lembaga lain karena gereja menyentuh aspek terdalam dari kehidupan manusia, yaitu *spiritualitas*. Proses penanaman nilai Pancasila dalam gereja tidak dapat dilepaskan dari metode pendidikan yang digunakan. Komunitas iman, gereja tidak hanya mencetak individu yang religius secara pribadi, tetapi juga warga negara yang memiliki kesadaran *kolektif*. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi era *globalisasi* dan *digitalisasi*, di mana arus informasi begitu cepat dan dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.

Mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila di internal GPdI *El-Shaddai*, dalam sila ke 1 terdapat jemaat yang masih bermain handphone saat ibadah berlangsung, sila ke 2 Jemaat yang kaya lebih dihormati atau lebih diprioritaskan dalam pelayanan dan perhatian gembala sidang, sementara jemaat miskin jarang dilibatkan, sila ke 3 Hanya kelompok jemaat tertentu yang diberi kesempatan melayani di mimbar atau sebagai pengurus, sila

ke 4 Pendeta atau pimpinan gereja menolak kritik atau masukan dari jemaat, bahkan menganggapnya sebagai bentuk pemberontakan rohani, dan sila ke 5 Pengelolaan keuangan gereja tidak transparan dan hanya dinikmati oleh kelompok jemaat tertentu. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Peranan Gereja dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada Jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme (studi kasus jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana GPdI *El-Shaddai* merancang dan menerapkan strategi dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada jemaatnya.
2. Untuk mengetahui peran aktif gereja sebagai agen transformasi sosial di tengah keberagaman masyarakat, khususnya dalam mempromosikan toleransi, gotong royong, dan solidaritas lintas agama.

### **C. Pembatasan Penelitian**

Pembatasan penelitian ini difokuskan pada lingkup aktivitas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur, sebagai institusi keagamaan yang berperan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada jemaatnya. Penelitian ini tidak membahas secara umum peran gereja-gereja lain di wilayah atau denominasi yang berbeda, melainkan secara khusus mengkaji strategi yang dirancang dan diterapkan oleh GPdI *El-Shaddai* dalam menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pembahasan difokuskan pada peran gereja sebagai agen transformasi sosial dalam konteks masyarakat majemuk, terutama terkait promosi nilai toleransi, gotong royong, dan solidaritas lintas agama. Penelitian ini juga dibatasi pada program-program yang secara langsung menasar pembinaan moral, kebangsaan, dan sosial, baik dalam bentuk ibadah, pengajaran, kegiatan pelayanan sosial, maupun pendidikan karakter dalam lingkungan gerejawi.

Aspek yang diamati meliputi pengaruh program-program tersebut terhadap perilaku jemaat serta bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, khususnya dalam interaksi lintas budaya dan keyakinan. Waktu penelitian dibatasi dalam periode tertentu selama pelaksanaan program berjalan, serta melibatkan narasumber yang terdiri dari pimpinan gereja, pelayan jemaat, dan anggota aktif GPdI *El-Shaddai* yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan focus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Gereja dalam Penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme?
2. Apa strategi yang digunakan GPdI *El-Shaddai* dalam menghadapi tantangan penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang plural?
3. Apa dampak dari peranan Gereja terhadap pemahaman dan pengamalan nilai- nilai Pancasila oleh jemaat dalam kehidupan bermasyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur, menjalankan perannya dalam menginternalisasi nilai- nilai Pancasila kepada jemaatnya di tengah konteks masyarakat yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi-strategi yang dirancang dan diterapkan oleh gereja dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan mampu menjembatani nilai-nilai kebangsaan dengan ajaran iman Kristiani. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana gereja berperan sebagai agen transformasi sosial, khususnya dalam membina sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas lintas agama di lingkungan sosial yang majemuk. Melalui

penelitian ini, akan diidentifikasi pula pengaruh konkret dari program-program gereja terhadap perilaku jemaat dan relasi sosial mereka, terutama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi gereja dalam memperkuat semangat kebangsaan, serta menjadi rujukan bagi gereja-gereja lain dalam peran serupa.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila, studi Pancasila, dan peran lembaga keagamaan dalam membentuk karakter kebangsaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai relevansi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat plural melalui pendekatan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga menambah khasanah kajian hubungan antara agama dan negara dalam perspektif kebangsaan Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bagi Gereja (GPdI *El-Shaddai* dan Gereja-gereja lain)**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk merancang program-program pelayanan yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada jemaat, khususnya di lingkungan masyarakat majemuk. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan- pendekatan baru yang kontekstual dalam membangun kesadaran Pancasila di kalangan jemaat.

b. Bagi Jemaat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran jemaat tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat didorong untuk tidak hanya hidup dalam iman yang aktif, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

c. Bagi Masyarakat Umum dan Pemerintah

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan seperti gereja dapat menjadi mitra strategis dalam penguatan karakter kebangsaan dan penanggulangan intoleransi. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal atau rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang membahas peran institusi keagamaan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks agama Kristen maupun agama-agama lainnya di Indonesia.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini berada dalam ranah Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila. Fokus utamanya adalah pada peran lembaga keagamaan dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai ideologi negara, yaitu Pancasila, kepada masyarakat melalui pendekatan spiritual, pendidikan iman, dan kegiatan sosial.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemimpin dan pelayan gereja (pendeta).
- b. Jemaat GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, baik anak-anak, remaja, pemuda, maupun dewasa yang terlibat aktif dalam kegiatan gereja.
- c. Tokoh masyarakat sekitar atau pihak eksternal yang pernah berinteraksi dengan program gereja dalam konteks sosial dan lintas agama.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

Peranan Gereja dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada Jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) *El-Shaddai*, yang berlokasi di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.

## 5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor:5220/UN26.13/PN.01.00/2025 pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan penelitian ini selesai

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Peranan Gereja pada Jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme**

##### **a. Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2009) Peran merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menggambarkan seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan norma yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau status sosialnya dalam masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2009), peran adalah aspek dinamis dari status sosial; ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, ia berarti sedang menjalankan suatu peran. Konsep ini menekankan bahwa peran bukan hanya sekadar kedudukan yang bersifat statis, tetapi menyangkut tindakan aktif seseorang dalam struktur sosial yang ada. Peran mencerminkan kontribusi nyata individu terhadap keteraturan sosial melalui pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang telah ditentukan oleh norma masyarakat.

Sementara itu, Bruce J. Cohen (2009) menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat norma yang melekat pada suatu posisi dalam masyarakat dan memberikan pedoman tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Melalui peran, individu belajar memahami harapan masyarakat dan menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan tatanan sosial. Peran juga membantu menjaga stabilitas dan keteraturan sosial karena setiap orang diharapkan bertindak sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

K. Davis (1960) memberikan pandangan bahwa peran adalah seperangkat aktivitas yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Dengan kata lain, peran berkaitan erat dengan harapan-harapan sosial terhadap perilaku individu, baik secara formal maupun informal. Peran tidak hanya mencerminkan tindakan yang dilakukan, tetapi juga ekspektasi sosial yang melekat pada posisi tersebut. Melalui pelaksanaan peran, individu tidak hanya menjalankan fungsi sosialnya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membentuk dan mempertahankan kehidupan sosial secara keseluruhan. Konsep peran dalam ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan struktur sosial yang membentuk dan mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Peran menjadi penghubung antara individu dengan sistem sosial, karena melalui peranlah seseorang dapat berinteraksi, berkontribusi, serta menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2009), peran merupakan wujud konkret dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status sosial. Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dapat diamati melalui tindakan dan perilaku sehari-hari individu dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, peran memiliki dimensi yang bersifat normatif sekaligus praktis. Dimensi normatif berkaitan dengan seperangkat aturan, nilai, dan harapan sosial yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan statusnya. Sementara itu, dimensi praktis tampak dalam pelaksanaan nyata peran tersebut dalam kehidupan sosial. Peran menjadi sarana bagi individu untuk mewujudkan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan kesinambungan sosial. Ketika individu menjalankan perannya secara konsisten dengan norma yang berlaku, maka stabilitas sosial dapat terpelihara dengan baik.

Soerjono Soekanto (2009) menegaskan bahwa peran bersifat dinamis, artinya peran selalu berkaitan dengan aktivitas dan tindakan nyata. Status sosial hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui peran. Tanpa pelaksanaan peran, status sosial hanya menjadi simbol yang tidak memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, peran dapat dipahami sebagai aktualisasi dari kedudukan sosial seseorang. Dalam proses ini, individu tidak hanya berfungsi sebagai pelaku pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Lebih lanjut, peran juga berkaitan dengan pola hubungan sosial yang terbangun antara individu dan kelompok. Setiap peran membawa konsekuensi terhadap cara individu berhubungan dengan orang lain. Dalam menjalankan perannya, seseorang diharapkan mampu menyesuaikan sikap dan perilaku dengan tuntutan sosial yang ada. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan peran dan harapan masyarakat dapat menimbulkan konflik peran (*role conflict*) atau ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peran memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan Bruce J. Cohen (2009) memperkuat pemahaman bahwa peran merupakan seperangkat norma yang melekat pada suatu posisi sosial. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak dan berperilaku. Melalui internalisasi norma peran, individu belajar memahami apa yang diharapkan masyarakat darinya. Proses internalisasi ini berlangsung melalui sosialisasi, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun institusi sosial lainnya. Dengan demikian, peran tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga membentuk kepribadian dan pola pikirnya dalam menghadapi realitas sosial.

Peran juga memiliki fungsi edukatif, karena melalui peran individu belajar tentang tanggung jawab sosial, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, pemahaman dan pelaksanaan peran menjadi semakin penting untuk menghindari gesekan sosial. Ketika setiap individu memahami perannya dan menjalankannya dengan baik, maka interaksi sosial dapat berlangsung secara harmonis dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa peran berkontribusi besar dalam menciptakan keteraturan sosial dan integrasi masyarakat.

Sementara itu, K. Davis (1960) menekankan bahwa peran merupakan seperangkat aktivitas yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya. Harapan sosial ini bersifat kolektif, artinya dibentuk dan disepakati oleh masyarakat. Peran tidak hanya mencerminkan apa yang dilakukan individu, tetapi juga mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap individu tersebut. Dengan demikian, peran menjadi cerminan hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Individu diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan norma yang berlaku, sementara masyarakat memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap pelaksanaan peran tersebut.

Pelaksanaan peran juga berimplikasi pada pembentukan identitas sosial individu. Melalui peran yang dijalankan, seseorang memperoleh pengakuan sosial dan membangun citra dirinya di hadapan masyarakat. Identitas sosial ini tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang seiring dengan perubahan peran yang dijalani individu dalam berbagai konteks kehidupan. Misalnya, seseorang dapat menjalankan peran yang berbeda dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat luas. Keragaman peran ini menuntut individu untuk memiliki kemampuan adaptasi sosial yang baik.

Dalam perspektif sosiologis, peran juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Norma-norma yang melekat pada peran mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perilaku menyimpang dapat diminimalkan.

Ketika individu menyimpang dari peran yang diharapkan, masyarakat akan memberikan sanksi sosial, baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa peran memiliki kekuatan regulatif dalam kehidupan sosial.

Lebih jauh, konsep peran dapat diterapkan untuk memahami peran institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, dan pemerintahan. Setiap institusi memiliki seperangkat peran yang dijalankan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam institusi keagamaan, misalnya, peran pemimpin dan anggota memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk nilai, moral, dan sikap sosial umat. Melalui pelaksanaan peran tersebut, institusi keagamaan dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, dari sudut pandang para ahli tersebut, peran tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial karena merupakan dasar dari interaksi sosial, struktur masyarakat, serta proses pembentukan identitas sosial. Peran juga menjadi sarana penting bagi individu untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, membangun hubungan antarindividu, dan berkontribusi terhadap keberlangsungan nilai dan norma dalam masyarakat.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran**

Berikut adalah deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi peran menurut para ahli dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), berdasarkan kajian ilmiah dan pendekatan kontemporer:

Peran individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat dinamis, terutama dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Menurut Hidayati & Prasetyo (2021), faktor lingkungan sosial seperti keluarga, komunitas, dan institusi sosial sangat mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan peran. Lingkungan yang mendukung akan membentuk individu yang mampu menjalankan peran sosialnya secara

optimal. Selain itu, faktor komunikasi interpersonal juga menjadi penentu penting. Menurut Rachmawati (2020), kemampuan individu dalam menjalin komunikasi yang efektif sangat memengaruhi keberhasilan peran yang dijalankan, terutama dalam konteks organisasi atau kelompok. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, ekspektasi peran menjadi lebih jelas dan konflik peran dapat diminimalisir.

Dalam kajian yang lebih mutakhir, Nurhayati dan Sugihartono (2022) menekankan pentingnya adaptabilitas terhadap perubahan sosial dan teknologi. Mereka menyebut bahwa peran kini tidak lagi bersifat statis, melainkan menuntut fleksibilitas individu dalam menyesuaikan diri dengan transformasi sosial, seperti digitalisasi dalam dunia kerja atau pendidikan. Oleh karena itu, kemampuan belajar, berpikir kritis, dan beradaptasi menjadi penentu utama keberhasilan seseorang dalam menjalankan peran di era kontemporer. Selanjutnya, faktor identitas diri dan nilai personal juga semakin diakui sebagai elemen penting.

Dalam penelitian oleh Wijayanti & Lestari (2023), ditemukan bahwa seseorang cenderung menjalankan peran secara konsisten apabila peran tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan identitas dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara peran sosial dan keyakinan individu akan meningkatkan komitmen dan kepuasan dalam menjalankan peran tersebut.

Selain faktor identitas diri dan nilai personal, faktor kompetensi dan kapasitas individu juga menjadi aspek yang semakin mendapat perhatian dalam kajian peran kontemporer. Kompetensi tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kompetensi sosial, emosional, dan moral. Menurut Putri dan Rahman (2021), individu yang memiliki kompetensi multidimensional cenderung lebih mampu menjalankan perannya secara efektif dalam berbagai situasi sosial.

Kompetensi ini memungkinkan individu untuk memahami tuntutan peran,

menyesuaikan perilaku dengan konteks sosial, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Dengan demikian, penguatan kompetensi menjadi prasyarat penting dalam menjalankan peran yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang terus berubah.

Selanjutnya, faktor kepemimpinan dan figur teladan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pelaksanaan peran, terutama dalam konteks organisasi dan komunitas. Penelitian oleh Suryadi dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin yang visioner, inklusif, dan berintegritas dapat mendorong individu untuk menjalankan perannya secara optimal. Figur teladan berfungsi sebagai acuan perilaku, nilai, dan sikap, sehingga individu tidak hanya memahami perannya secara normatif, tetapi juga secara praktis melalui contoh nyata. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang partisipatif mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi individu untuk mengembangkan perannya secara aktif dan bertanggung jawab.

Faktor budaya juga tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika peran individu dalam masyarakat. Budaya membentuk norma, nilai, dan ekspektasi sosial yang menjadi kerangka dalam menjalankan peran. Menurut Lestari dan Handayani (2022), peran individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam masyarakat multikultural, individu dituntut untuk mampu menavigasi berbagai nilai budaya yang berbeda agar dapat menjalankan perannya secara harmonis. Oleh karena itu, pemahaman lintas budaya menjadi kemampuan penting dalam pelaksanaan peran sosial di masyarakat plural.

Di samping itu, faktor struktural dan kebijakan juga berperan dalam menentukan ruang gerak individu dalam menjalankan perannya. Struktur sosial, regulasi, serta kebijakan publik dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan peran. Menurut penelitian oleh Anwar dan Fitriani

(2023), kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan memperluas kesempatan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai peran sosial.

Sebaliknya, kebijakan yang tidak adaptif dapat membatasi kreativitas dan inisiatif individu. Hal ini menunjukkan bahwa peran individu tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks struktural yang melingkupinya.

Faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga menjadi elemen penting dalam kajian peran. Motivasi intrinsik, seperti dorongan moral, panggilan nilai, dan kepuasan batin, sering kali menjadi kekuatan utama yang mendorong individu untuk menjalankan perannya secara konsisten. Sementara itu, motivasi ekstrinsik, seperti penghargaan sosial, pengakuan, dan insentif material, berfungsi sebagai penguat dalam pelaksanaan peran. Menurut Dewi dan Santoso (2021), keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik akan menghasilkan kinerja peran yang lebih stabil dan berkelanjutan. Individu yang hanya bergantung pada motivasi eksternal cenderung mengalami penurunan komitmen ketika dukungan tersebut berkurang.

Perkembangan teknologi digital turut memberikan dampak signifikan terhadap dinamika peran individu dalam masyarakat modern. Teknologi tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial dan tuntutan peran yang baru. Menurut Prabowo dan Amelia (2024), era digital menuntut individu untuk menguasai literasi digital agar dapat menjalankan perannya secara efektif, baik sebagai anggota masyarakat, pekerja, maupun warga negara. Ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi dapat menyebabkan ketimpangan peran dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan peran di era kontemporer.

Selain literasi digital, faktor partisipasi sosial juga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan peran. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial

memungkinkan individu untuk belajar, berinteraksi, dan menginternalisasi nilai-nilai sosial yang relevan dengan perannya. Menurut Hasanah dan Mulyono (2022), individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan komunitas cenderung memiliki pemahaman peran yang lebih mendalam dan rasa tanggung jawab sosial yang lebih kuat. Partisipasi sosial juga memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas, sehingga individu terdorong untuk menjalankan perannya secara sukarela dan berkelanjutan.

Faktor dukungan sosial merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi peran individu. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, teman sebaya, komunitas, maupun institusi. Menurut penelitian oleh Rahmawati dan Yuliana (2021), dukungan emosional, informasional, dan instrumental dapat meningkatkan kepercayaan diri individu dalam menjalankan perannya. Ketika individu merasa didukung, mereka lebih mampu menghadapi tantangan dan tekanan yang muncul dalam pelaksanaan peran. Sebaliknya, minimnya dukungan sosial dapat menyebabkan stres peran dan penurunan kinerja peran.

Dalam perspektif psikososial, faktor kesejahteraan mental juga berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam menjalankan perannya. Kondisi psikologis yang sehat memungkinkan individu untuk berpikir jernih, mengelola emosi, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial. Menurut Utami dan Saputra (2023), individu dengan kesejahteraan mental yang baik cenderung lebih adaptif dan resilien dalam menghadapi tuntutan peran yang kompleks. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental menjadi bagian integral dalam upaya penguatan peran individu di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, kajian para ahli dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peran individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan bersifat dinamis. Faktor lingkungan sosial, komunikasi, adaptabilitas, identitas diri, kompetensi, kepemimpinan, budaya, kebijakan,

motivasi, teknologi, partisipasi sosial, dukungan sosial, serta kesejahteraan mental membentuk suatu ekosistem yang memengaruhi bagaimana individu memahami, menjalankan, dan mempertahankan perannya.

### **c. Pengertian Gereja**

Gereja secara umum dipahami bukan hanya sebagai bangunan tempat ibadah umat Kristen, tetapi juga sebagai komunitas umat percaya yang menjalankan misi spiritual dan sosial berdasarkan ajaran Kristus. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah pakar teologi dan sosiologi agama memberikan definisi gereja yang lebih holistik dan kontekstual, sejalan dengan dinamika masyarakat modern.

Menurut John D. Zizioulas (2021), seorang teolog Ortodoks kontemporer, gereja adalah persekutuan umat percaya yang dipersatukan dalam perjamuan kudus dan hidup dalam kesatuan dengan Kristus sebagai kepala. Gereja bukan sekadar lembaga religius, tetapi tubuh mistik Kristus yang menghadirkan realitas Kerajaan Allah di tengah dunia. Ia menekankan bahwa gereja harus dilihat dalam kerangka relasional dan eskatologis, bukan hanya institusional.

William T. Cavanaugh (2020), seorang teolog Katolik dan pemikir sosial, mendefinisikan gereja sebagai komunitas alternatif yang berperan kritis terhadap tatanan dunia sekuler. Gereja, menurut Cavanaugh, adalah tubuh sosial yang mempraktikkan solidaritas, pengampunan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang kapitalistik dan individualistik. Gereja hadir bukan untuk menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi untuk mentransformasikannya.

Amos Yong (2022), seorang teolog Pantekosta dari konteks Asia- Amerika, memandang gereja sebagai komunitas Roh Kudus yang bersifat inklusif, kontekstual, dan misioner. Dalam pandangan ini, gereja bukan hanya tempat ritual, melainkan ruang perjumpaan antar budaya, tempat pemulihan, dan wadah partisipasi aktif dalam keadilan sosial.

Gereja Pantekosta di Indonesia merupakan salah satu aliran gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berlandaskan pada ajaran Alkitab dan menekankan pengalaman hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja ini berkembang dari gerakan Pentakosta yang muncul pada awal abad ke-20 dan menekankan pentingnya pertobatan, kelahiran baru, kekudusan hidup, kuasa doa, serta pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam praktik ibadahnya, Gereja Pantekosta di Indonesia dikenal dengan penyembahan yang hidup, doa syafaat, pujian, serta keyakinan akan karunia-karunia Roh Kudus seperti berbahasa roh, nubuat, penyembuhan ilahi, dan mujizat sebagai bagian dari karya Allah bagi orang percaya.

Gereja Pantekosta di Indonesia juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat satu-satunya bagi manusia. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, sesuai dengan ajaran Alkitab. Selain itu, gereja ini menekankan pentingnya memberitakan Injil, hidup dalam kasih, menjaga kekudusan, dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.

Dasar ajaran Gereja Pantekosta di Indonesia bersumber dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satu dasar utama mengenai pencurahan Roh Kudus terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul yang menjelaskan tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2:4 tertulis bahwa semua orang yang berkumpul dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ini menjadi dasar penting bagi gereja Pentakosta mengenai baptisan Roh Kudus. Selain itu, dalam Yoel 2:28 Allah berfirman bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Nubuat ini dipercaya digenapi dalam peristiwa Pentakosta di Perjanjian Baru.

Dalam Yohanes 3:5 Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya lahir baru oleh air dan Roh agar seseorang dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Kemudian dalam Galatia 5:22-23 dijelaskan tentang buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya.

Lebih lanjut, gereja juga dipahami sebagai ruang pendidikan nilai dan karakter. Melalui khotbah, pengajaran, pembinaan jemaat, serta berbagai aktivitas pelayanan, gereja berperan dalam membentuk sikap moral dan etika sosial jemaat. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, kejujuran, solidaritas, dan pengabdian kepada sesama menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kebangsaan, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemahaman gereja sebagai komunitas yang hidup dan berelasi juga menegaskan bahwa gereja tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan sosial tempat ia berada. Gereja di Indonesia, misalnya, hidup dalam masyarakat yang majemuk secara etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mengembangkan teologi dan praksis pelayanan yang kontekstual, yakni pelayanan yang peka terhadap realitas sosial, budaya, dan kebangsaan. Gereja tidak hanya mengimpor konsep teologis dari konteks Barat, tetapi juga menggali nilai-nilai lokal yang sejalan dengan ajaran Kristiani dan nilai kebangsaan.

Dalam konteks pluralisme agama, gereja memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog antarumat beragama. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menjaga identitas imannya, tetapi juga untuk membangun relasi yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Dialog antaragama, kerja sama sosial lintas iman, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan wujud konkret dari peran gereja sebagai komunitas yang inklusif dan terbuka.

Selain itu, gereja juga berperan sebagai ruang pembinaan kesadaran kritis jemaat terhadap berbagai persoalan sosial. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan oleh gereja. Dalam hal ini, gereja dipanggil untuk tidak bersikap netral atau apatis, melainkan mengambil posisi profetis dengan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Gereja berfungsi sebagai suara moral yang mengingatkan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia.

Peran gereja sebagai komunitas profetis ini menuntut keberanian dan konsistensi dalam bersikap. Gereja tidak hanya memberikan kritik sosial, tetapi juga terlibat secara nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Program-program pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi menjadi wujud konkret dari iman yang bekerja melalui kasih. Dengan demikian, gereja tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai luhur, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media digital, gereja juga dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensi panggilannya. Gereja sebagai komunitas iman perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana perawatan, pembinaan, dan pelayanan. Namun, pada saat yang sama, gereja harus tetap menekankan pentingnya relasi personal, kebersamaan, dan persekutuan yang autentik. Gereja tidak boleh terjebak pada formalisme digital semata, melainkan tetap menghadirkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan di tengah arus modernisasi.

Pemahaman gereja yang holistik juga mencakup kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif jemaat. Gereja bukan hanya milik para pemimpin atau rohaniwan, tetapi merupakan komunitas yang dibangun oleh seluruh umat percaya. Setiap anggota jemaat memiliki peran dan tanggung jawab dalam

kehidupan gereja dan masyarakat. Partisipasi aktif jemaat dalam pelayanan, kegiatan sosial, dan kehidupan bermasyarakat menjadi indikator penting dari gereja yang hidup dan dinamis.

Lebih jauh, gereja sebagai komunitas iman juga berperan dalam membentuk kesadaran kebangsaan jemaat. Dalam konteks Indonesia, gereja diharapkan mampu menanamkan semangat cinta tanah air, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen terhadap persatuan nasional. Nilai-nilai kebangsaan tidak dipandang bertentangan dengan iman Kristen, melainkan sebagai bagian dari panggilan iman untuk mengasihi sesama dan membangun kehidupan bersama yang adil dan damai.

Dengan demikian, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai agen pembaruan sosial dan moral. Gereja hadir sebagai komunitas yang membawa harapan, perdamaian, dan keadilan di tengah dunia yang penuh tantangan. Pemahaman gereja yang holistik dan kontekstual ini menegaskan bahwa keberadaan gereja memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa gereja masa kini dituntut untuk terus merefleksikan identitas dan misinya secara kritis dan kontekstual. Gereja tidak dapat berhenti pada pemahaman tradisional yang sempit, tetapi harus terbuka terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan dasar iman yang kokoh. Dalam proses ini, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang setia pada ajaran Kristus sekaligus relevan bagi masyarakat modern yang plural dan terus berubah.

#### **d. Sejarah Gereja**

Sejarah Gereja merupakan perjalanan panjang umat Kristen sejak awal abad pertama hingga era kontemporer, yang mencerminkan transformasi teologis, sosial, dan institusional dalam berbagai konteks zaman. Gereja bermula sebagai komunitas kecil pengikut Yesus Kristus yang percaya akan kebangkitan-Nya, dan berkumpul pertama kali di Yerusalem setelah peristiwa

Pentakosta. Komunitas ini kemudian berkembang menjadi gerakan keagamaan yang tersebar luas di dunia Yunani-Romawi, meskipun harus menghadapi penganiayaan dan tekanan dari kekuasaan politik. Gereja mula-mula tetap bertahan berkat semangat penginjilan, solidaritas antarumat, dan keyakinan akan kedatangan Kristus kembali. Moss (2019) menyatakan bahwa kekuatan iman para martir dalam menghadapi siksaan justru menjadi inspirasi yang mengobarkan pertumbuhan dan pengaruh Gereja di wilayah Mediterania.

Transformasi penting terjadi ketika Kaisar Konstantinus mengesahkan agama Kristen melalui Edik Milan pada tahun 313 M. Hal ini menjadikan Gereja beralih dari komunitas marginal menjadi institusi yang dilegitimasi negara, dan memicu lahirnya konsili-konsili ekumenis seperti Konsili Nicea (325 M) yang menyusun rumusan doktrinal Kristen. Perubahan status ini membawa implikasi besar terhadap relasi antara Gereja dan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Hvalvik (2020), bahwa penyatuan antara kekuasaan spiritual dan politik menciptakan peluang bagi penyebaran ajaran Kristen, namun juga memunculkan potensi kompromi terhadap kemurnian iman.

Pada masa Abad Pertengahan, Gereja Katolik Roma menjadi institusi dominan di Eropa. Paus berperan bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam urusan politik kerajaan dan kekaisaran. Gereja menjadi pusat ilmu pengetahuan, pendidikan, serta penjaga warisan intelektual melalui biara dan universitas. Namun demikian, posisi dominan Gereja juga memicu kritik internal terhadap praktik korupsi dan penyimpangan teologis. MacCulloch (2020) menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Gereja yang hirarkis kerap kali mengabaikan suara jemaat akar rumput, sehingga muncul gerakan pembaruan dari dalam.

Gerakan Reformasi pada abad ke-16 menjadi titik balik penting dalam sejarah Gereja Barat. Dipelopori oleh Martin Luther di Jerman, reformasi ini menolak otoritas Paus dan mengkritik penjualan indulgensi, serta menekankan kembalinya ajaran pada otoritas Kitab Suci. Proses ini menghasilkan fragmentasi Gereja menjadi berbagai denominasi seperti Lutheran, Reformed, dan Anglikan.

Lindberg (2021) menekankan bahwa Reformasi tidak hanya berdampak pada ranah teologis, tetapi juga mengubah struktur sosial, sistem pendidikan, dan pemerintahan di Eropa.

Setelah reformasi, Gereja memasuki era ekspansi global melalui gerakan misi yang menjangkau Asia, Afrika, dan Amerika. Kolonialisme dan kekristenan kerap berjalan beriringan, meskipun tidak selalu dengan harmoni. Dalam konteks ini, Sanneh (2019) menekankan pentingnya penerjemahan Injil ke dalam bahasa-bahasa lokal, yang memungkinkan umat non-Barat memiliki pemahaman kontekstual terhadap iman Kristen. Penyebaran Kekristenan global tidak hanya mengakar di Barat, tetapi mulai berkembang pesat di wilayah-wilayah Selatan dunia, termasuk Afrika dan Asia.

Memasuki abad ke-20 dan ke-21, Gereja menghadapi tantangan sekularisme, relativisme moral, serta pluralisme agama. Gereja Katolik merespon perubahan zaman dengan menyelenggarakan Konsili Vatikan II (1962–1965) yang mengusulkan pembaruan liturgi, keterbukaan terhadap agama lain, dan partisipasi umat awam. Sementara itu, Gereja Protestan di berbagai belahan dunia juga mengalami revitalisasi melalui gerakan kharismatik dan pentakostal. Philip Jenkins (2023) mengungkapkan bahwa pusat pertumbuhan Gereja global kini telah bergeser dari Eropa ke wilayah Global South seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia, menandai transformasi wajah Kekristenan yang lebih beragam secara budaya dan etnis. Sejarah Gereja pada akhirnya adalah sejarah umat manusia yang terus mencari Tuhan dalam konteks zamannya. Gereja telah melewati fase-fase konflik, pertumbuhan,

pembaruan, hingga keterbukaan terhadap dunia modern.

Dalam keseluruhan dinamika tersebut, Gereja tidak pernah berhenti menjadi wadah spiritual, sosial, dan moral bagi umat manusia lintas generasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Gereja tidak hanya dipahami sebagai institusi formal dengan struktur kepemimpinan tertentu, tetapi juga sebagai persekutuan umat beriman yang hidup dan bergerak di tengah realitas sosial yang terus berubah. Pemahaman eklesiologis modern menekankan bahwa Gereja adalah *ekklesia*, yakni umat yang dipanggil keluar untuk memberi kesaksian tentang kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini menegaskan bahwa Gereja tidak dapat memisahkan diri dari persoalan kemanusiaan seperti keadilan sosial, kemiskinan, perdamaian, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, Gereja dipanggil untuk hadir secara profetis, yakni menyuarakan kebenaran dan keadilan, sekaligus bersikap pastoral dengan merangkul mereka yang terpinggirkan.

Seiring dengan menguatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial, Gereja di berbagai belahan dunia mulai mengembangkan teologi kontekstual yang berangkat dari pengalaman konkret umat. Teologi pembebasan di Amerika Latin, misalnya, muncul sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan penindasan struktural. Teologi ini menekankan bahwa iman Kristen tidak hanya berbicara tentang keselamatan rohani, tetapi juga pembebasan manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan. Di Afrika dan Asia, teologi kontekstual berkembang dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, sehingga Kekristenan tidak dipahami sebagai agama asing, melainkan sebagai iman yang berakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan ini memperkaya wajah Gereja global dan menunjukkan bahwa Kekristenan bersifat universal sekaligus kontekstual.

Dalam dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, Gereja juga menghadapi tantangan baru dalam bentuk perubahan budaya, kemajuan teknologi, dan transformasi pola relasi manusia. Media digital dan teknologi komunikasi telah mengubah cara Gereja berinteraksi dengan umat. Ibadah

daring, penginjilan melalui media sosial, dan komunitas virtual menjadi fenomena yang semakin umum, terutama sejak pandemi global COVID-19. Transformasi ini menimbulkan diskursus teologis mengenai makna persekutuan, kehadiran sakramental, dan spiritualitas di era digital. Gereja dituntut untuk bersikap adaptif tanpa kehilangan esensi iman dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Selain tantangan teknologi, Gereja juga dihadapkan pada dinamika pluralisme agama yang semakin kompleks. Di banyak negara, umat Kristen hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam ruang publik yang sama. Kondisi ini menuntut Gereja untuk mengembangkan sikap dialogis, toleran, dan terbuka, tanpa harus mengorbankan identitas iman. Dialog antaragama dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk membangun perdamaian, saling pengertian, dan kerja sama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan bersama.

Gereja dipanggil untuk menjadi jembatan yang mempertemukan perbedaan, serta menjadi agen rekonsiliasi di tengah konflik sosial dan keagamaan.

Dalam konteks politik dan kebangsaan, Gereja juga memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral yang mengawal nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Sejarah menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi, Gereja dapat menjadi suara kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan struktural. Namun, di sisi lain, Gereja juga dihadapkan pada tantangan menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan politik agar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis yang dapat merusak integritas kesaksian iman. Relasi antara Gereja dan negara terus menjadi diskursus penting, terutama dalam masyarakat plural dan demokratis.

Perubahan internal dalam tubuh Gereja juga menjadi bagian penting dari sejarah kontemporer Kekristenan. Isu kepemimpinan, partisipasi perempuan, peran kaum muda, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga Gereja menjadi perhatian serius di berbagai denominasi. Gereja dituntut untuk melakukan

refleksi diri secara kritis dan berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pembaruan struktural dan pastoral dipandang sebagai upaya untuk memperkuat pelayanan Gereja, bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap tradisi. Dengan demikian, Gereja diharapkan mampu menghadirkan wajah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, spiritualitas Kristen tetap menjadi inti kehidupan Gereja. Praktik doa, ibadah, sakramen, dan pembinaan iman terus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menghadapi tantangan hidup. Spiritualitas yang berakar pada kasih, pengharapan, dan solidaritas menjadi fondasi bagi keterlibatan Gereja dalam dunia. Gereja tidak hanya dipanggil untuk mengajarkan doktrin, tetapi juga untuk membentuk karakter umat yang mencerminkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Sejarah Gereja juga memperlihatkan bahwa perubahan dan pembaruan sering kali lahir dari krisis. Setiap periode pergumulan membawa kesempatan bagi Gereja untuk merefleksikan kembali panggilannya di tengah dunia. Dari penganiayaan pada masa awal, dominasi institusional di Abad Pertengahan, fragmentasi pada era Reformasi, hingga tantangan pluralisme dan sekularisme di era modern, Gereja terus mengalami proses pemurnian dan transformasi. Proses ini menegaskan bahwa Gereja bukanlah realitas statis, melainkan komunitas iman yang dinamis dan terus bertumbuh.

Pada akhirnya, sejarah Gereja merupakan cermin perjalanan iman umat manusia yang senantiasa berusaha memahami kehendak Tuhan dalam konteks sejarah yang konkret. Gereja hidup dalam ketegangan antara tradisi dan pembaruan, antara iman dan realitas sosial, serta antara kesetiaan pada ajaran dan keterbukaan terhadap perubahan zaman. Ketegangan ini bukanlah kelemahan, melainkan bagian inheren dari kehidupan Gereja sebagai komunitas yang berjalan dalam sejarah.

Dengan demikian, Gereja di era kontemporer dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk terus memperbarui diri tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda harapan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, konflik, dan krisis nilai. Sejarah panjang yang telah dilalui menjadi sumber pembelajaran berharga bagi Gereja untuk menata langkah ke depan, agar tetap setia pada panggilannya sebagai persekutuan umat yang menghadirkan kasih Allah bagi seluruh ciptaan.

#### **e. Pengertian Jemaat**

Menurut Manurung (2020), jemaat adalah kumpulan orang percaya yang disatukan dalam iman kepada Yesus Kristus dan dipanggil untuk hidup bersama dalam persekutuan, ibadah, dan pelayanan. Jemaat bukan sekadar institusi keagamaan, tetapi komunitas spiritual yang hidup dan aktif, di mana anggotanya saling mendukung dan bertumbuh dalam kasih dan pengajaran firman Tuhan. Jemaat memiliki fungsi penting sebagai tubuh Kristus yang merepresentasikan kerajaan Allah di dunia ini melalui kesaksian dan perbuatan kasih.

Simanjuntak (2021) menjelaskan bahwa jemaat merupakan himpunan orang-orang percaya yang memiliki kesamaan tujuan rohani dan menjalankan kehidupan yang dipimpin oleh nilai-nilai Injil. Ia menekankan bahwa jemaat tidak hanya berkumpul secara fisik, tetapi terikat secara spiritual melalui kesetiaan kepada Kristus dan tanggung jawab satu sama lain dalam kehidupan iman. Peran jemaat mencakup tiga aspek utama: koinonia (persekutuan), diakonia (pelayanan), dan marturia (kesaksian).

Lase (2023) memandang jemaat sebagai entitas sosial dan spiritual yang terdiri dari individu-individu yang percaya kepada Kristus dan bersedia menjalankan panggilan gerejawi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Jemaat tidak hanya berada dalam batas dinding gereja, melainkan hadir aktif di tengah masyarakat sebagai agen transformasi sosial. Dalam pandangannya, jemaat dipahami sebagai ruang pembinaan iman dan penguatan nilai-nilai kekristenan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan konseptual dari Manurung (2020), Simanjuntak (2021), dan Lase (2023), jemaat dapat dipahami sebagai realitas iman yang bersifat dinamis, kontekstual, dan terus berkembang. Jemaat bukanlah entitas statis yang hanya hadir dalam ruang ibadah formal, melainkan komunitas hidup yang bergerak, bertumbuh, dan berinteraksi secara aktif dengan realitas sosial di sekitarnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa jemaat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagai komunitas iman, jemaat berakar pada pengakuan bersama akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Iman inilah yang menjadi dasar persatuan jemaat dan membedakannya dari komunitas sosial lainnya. Namun demikian, iman tersebut tidak berhenti pada aspek pengakuan personal, melainkan diwujudkan dalam kehidupan bersama yang diwarnai oleh nilai kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, jemaat menjadi ruang di mana iman dihidupi, diuji, dan dikuatkan melalui relasi antaranggota.

Ibadah memegang peranan sentral dalam kehidupan jemaat. Ibadah bukan sekadar aktivitas ritual, tetapi merupakan pusat pembaruan spiritual yang membentuk orientasi hidup jemaat. Melalui ibadah, jemaat mengalami perjumpaan dengan Allah, menerima pengajaran firman, serta diteguhkan untuk menjalani panggilan hidupnya di tengah dunia. Ibadah yang hidup dan kontekstual mendorong jemaat untuk mengintegrasikan iman dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Injil tidak berhenti di ruang gereja, tetapi mengalir ke dalam kehidupan sosial. Persekutuan atau koinonia menjadi fondasi relasional dalam kehidupan jemaat. Dalam persekutuan, jemaat belajar untuk hidup saling bergantung, saling menguatkan, dan saling membangun. Koinonia menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak dijalani secara individualistik, melainkan secara komunal sebagai satu tubuh Kristus. Relasi yang terbangun dalam persekutuan menjadi sarana pembentukan karakter, pendewasaan iman, serta pemulihan relasi antaranggota jemaat.

Dalam konteks masyarakat yang plural dan majemuk, persekutuan jemaat juga memiliki fungsi strategis sebagai ruang pembelajaran sosial. Jemaat belajar mengelola perbedaan latar belakang, karakter, dan pandangan hidup dalam semangat kasih Kristus. Pengalaman ini membekali jemaat untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat yang lebih luas, menghargai keberagaman, serta membangun relasi yang inklusif dan dialogis.

Aspek diakonia atau pelayanan menegaskan dimensi praksis dari kehidupan jemaat. Pelayanan merupakan wujud nyata dari iman yang bekerja melalui kasih. Jemaat dipanggil untuk merespons berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan, dan keterpinggiran dengan tindakan kasih yang konkret. Diakonia tidak hanya dipahami sebagai kegiatan karitatif, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang bertujuan memulihkan martabat manusia dan menciptakan keadilan sosial.

Pelayanan jemaat yang kontekstual menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, jemaat menghadirkan nilai-nilai Injil secara nyata dan relevan. Dalam proses ini, jemaat tidak hanya memberi, tetapi juga belajar, berelasi, dan bertumbuh bersama masyarakat.

Diakonia menjadi jembatan yang menghubungkan iman dengan realitas sosial, serta memperkuat kehadiran gereja sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Marturia atau kesaksian merupakan dimensi penting lainnya dalam kehidupan jemaat. Kesaksian tidak terbatas pada pemberitaan Injil secara verbal, tetapi terwujud dalam gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani.

Integritas, kejujuran, keadilan, dan kasih menjadi bentuk kesaksian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui kehidupan yang konsisten antara iman dan perbuatan, jemaat menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia.

Kesaksian jemaat memiliki dampak yang luas karena dilakukan dalam berbagai ruang kehidupan, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan sosial, dan ruang publik. Dengan menjalani peran sosialnya secara bertanggung jawab, jemaat turut berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang bermoral, adil, dan beradab. Dalam konteks ini, marturia menjadi panggilan yang melekat pada setiap anggota jemaat, bukan hanya pada pemimpin gereja.

Jemaat juga dapat dipahami sebagai agen transformasi sosial. Keberadaannya di tengah masyarakat membawa potensi perubahan yang konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pendidikan iman, pembinaan karakter, dan keterlibatan sosial, jemaat berperan dalam membentuk individu-individu yang memiliki kepedulian sosial, kesadaran etis, dan tanggung jawab kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa iman Kristen memiliki implikasi nyata bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sebagai agen transformasi, jemaat dipanggil untuk bersikap kritis dan reflektif terhadap realitas sosial. Jemaat tidak hanya menerima keadaan apa adanya, tetapi berupaya menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah sebagai alternatif atas praktik-praktik sosial yang tidak adil dan tidak manusiawi. Melalui suara kenabian dan tindakan nyata, jemaat turut ambil bagian dalam proses perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif teologis, jemaat merupakan perwujudan tubuh Kristus di dunia. Setiap anggota jemaat memiliki peran dan karunia yang berbeda, namun saling melengkapi dalam satu kesatuan. Kesadaran akan keberagaman karunia ini mendorong jemaat untuk mengembangkan partisipasi aktif seluruh anggota dalam kehidupan gereja dan pelayanan sosial. Dengan demikian, jemaat menjadi komunitas yang inklusif dan partisipatif.

Jemaat sebagai komunitas pembelajar memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan pemahaman iman yang relevan dengan konteks zaman. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai sosial menuntut jemaat untuk bersikap adaptif tanpa kehilangan identitas iman. Proses pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci agar jemaat mampu menjawab tantangan tersebut secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain itu, jemaat berfungsi sebagai ruang pembentukan etika dan moral Kristen. Nilai-nilai Injil seperti kasih, keadilan, solidaritas, dan perdamaian ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi jemaat dalam membangun relasi sosial yang sehat dan bermartabat, baik di dalam maupun di luar gereja. Keberadaan jemaat di tengah masyarakat plural menuntut sikap terbuka dan inklusif. Jemaat dipanggil untuk menjalin relasi yang harmonis dengan komunitas lain, menghormati perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan bersama yang damai. Sikap ini mencerminkan iman yang dewasa dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran jemaat sebagai mitra sosial dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks kebangsaan, jemaat juga memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Nilai-nilai kekristenan yang dihidupi jemaat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Dengan demikian, jemaat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan berkeadilan sosial.

Pemahaman tentang jemaat sebagai komunitas iman dan agen transformasi sosial menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Iman yang sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, jemaat dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan antara kesalehan pribadi dan tanggung jawab sosial.

Melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang konsisten, jemaat diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah secara nyata di tengah dunia. Kehadiran jemaat menjadi tanda harapan bagi masyarakat, sekaligus sarana bagi terwujudnya kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, jemaat bukan hanya objek pembinaan gereja, tetapi subjek aktif dalam misi Allah di dunia. Setiap anggota jemaat dipanggil untuk terlibat secara nyata dalam kehidupan gereja dan masyarakat, sesuai dengan karunia dan panggilan masing-masing. Dalam kerangka inilah jemaat terus bertumbuh sebagai komunitas iman yang hidup, relevan, dan transformatif.

Keseluruhan pemaparan ini menegaskan bahwa jemaat merupakan pusat kehidupan iman Kristen yang memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan rohani dan sosial. Jemaat menjadi wadah pembentukan iman, ruang pelayanan kasih, serta agen kesaksian yang menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat yang terus berubah. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, jemaat diharapkan mampu menjalankan panggilannya secara utuh dan berkelanjutan di tengah dinamika kehidupan dunia.

#### **f. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki interaksi sosial yang intens serta budaya yang sama atau saling memengaruhi. Dalam perkembangan keilmuan sosiologi dan antropologi modern, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai sistem sosial yang kompleks dengan struktur, norma, dan nilai yang mengatur kehidupan bersama.

Menurut Soekanto (2020), masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat unsur interaksi sosial, norma sosial, dan struktur yang mengikat individu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa eksistensi masyarakat tidak lepas dari kesadaran kolektif serta adanya

sistem yang terorganisir, yang memungkinkan setiap individu menjalankan perannya dalam tatanan sosial. Masyarakat dibentuk atas dasar hubungan timbal balik dan adanya kepentingan bersama.

Latief dan Mulyana (2021) menyatakan bahwa masyarakat adalah entitas sosial yang terbentuk dari individu-individu yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik secara material maupun spiritual. Mereka menyoroti pentingnya nilai dan norma yang dijadikan pedoman bersama, serta peran komunikasi sebagai sarana pengikat antar anggota masyarakat. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai ruang dialektika antara individu dan struktur sosial yang terus-menerus berubah sesuai konteks budaya dan sejarah.

Sementara itu, Hidayat (2022) melihat masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial yang terbentuk melalui proses historis dan kultural, di mana individu bukan hanya sebagai objek dari struktur sosial, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam membentuk realitas sosial. Menurutnya, masyarakat bersifat dinamis dan reflektif terhadap perubahan sosial, seperti globalisasi dan digitalisasi, yang turut memengaruhi pola interaksi antaranggota masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang terorganisasi dan memiliki pola-pola hubungan sosial yang relatif ajeg. Pola hubungan ini terbentuk melalui proses interaksi yang berulang dan berkesinambungan, sehingga melahirkan kebiasaan, tradisi, serta aturan tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Aturan-aturan tersebut kemudian berkembang menjadi norma sosial yang berfungsi mengatur perilaku individu agar selaras dengan kepentingan kolektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi wadah bagi individu untuk hidup bersama, tetapi juga menjadi sistem pengendali sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan sosial.

Dalam perspektif sosiologi klasik, masyarakat sering dikaitkan dengan konsep solidaritas sosial. Durkheim, misalnya, membedakan solidaritas mekanik dan solidaritas organik sebagai bentuk perekat sosial dalam masyarakat tradisional dan modern. Solidaritas mekanik ditandai oleh kesamaan nilai, kepercayaan, dan aktivitas antaranggota masyarakat, sedangkan solidaritas organik muncul dalam masyarakat modern yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks dan saling ketergantungan fungsional. Meskipun konteks masyarakat terus mengalami perubahan, kedua bentuk solidaritas ini masih relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan kohesi sosial di tengah perbedaan dan keragaman.

Masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan menjadi identitas kolektif yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, termasuk dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perubahan sosial.

Dalam masyarakat plural, kebudayaan berperan sebagai sarana dialog dan negosiasi sosial yang memungkinkan terjadinya kehidupan bersama secara harmonis di tengah keberagaman latar belakang etnis, agama, dan sosial. Selain kebudayaan, struktur sosial merupakan unsur penting dalam memahami masyarakat. Struktur sosial mencakup pola hubungan yang bersifat hierarkis maupun horizontal, seperti stratifikasi sosial, pembagian peran, dan kedudukan sosial. Stratifikasi sosial menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, atau status sosial. Pelapisan ini memengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan kesempatan sosial. Namun demikian, struktur sosial tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring dengan mobilitas sosial dan dinamika perkembangan masyarakat.

Perubahan sosial menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat berlangsung secara lambat maupun cepat, terencana maupun tidak terencana. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan demografi, kontak dengan kebudayaan lain, serta dinamika politik dan ekonomi. Globalisasi dan digitalisasi, misalnya, telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, dari yang semula bersifat tatap muka menjadi semakin dimediasi oleh teknologi komunikasi.

Dalam konteks masyarakat modern, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial baru yang membentuk identitas dan relasi sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk berinteraksi melampaui batas geografis, sekaligus menciptakan komunitas-komunitas virtual dengan kepentingan dan nilai tertentu. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, seperti melemahnya interaksi sosial langsung, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta potensi konflik akibat perbedaan pandangan yang diekspresikan secara bebas di ruang digital.

Masyarakat sebagai sistem sosial juga memiliki mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keteraturan dan mencegah penyimpangan. Pengendalian sosial dapat bersifat formal maupun informal. Pengendalian formal dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi seperti hukum, aparat keamanan, dan institusi negara, sedangkan pengendalian informal dilakukan melalui norma, adat istiadat, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kedua bentuk pengendalian ini saling melengkapi dalam membentuk perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, konflik sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Konflik muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau akses terhadap sumber daya yang terbatas. Meskipun sering dipandang negatif, konflik juga memiliki fungsi sosial, antara lain sebagai sarana untuk menegaskan norma, mendorong perubahan sosial, dan

memperbaiki struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik secara konstruktif menjadi indikator penting bagi kematangan sosial suatu masyarakat.

Dalam masyarakat plural, toleransi dan dialog antar kelompok menjadi kunci utama dalam menjaga integrasi sosial. Toleransi tidak hanya berarti sikap saling menghormati perbedaan, tetapi juga kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Dialog antar kelompok sosial dan budaya memungkinkan terjadinya saling pengertian, mengurangi prasangka, serta memperkuat kohesi sosial. Peran lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan menjadi sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan.

Lebih lanjut, masyarakat juga berfungsi sebagai ruang sosialisasi bagi individu. Melalui proses sosialisasi, individu mempelajari nilai, norma, peran, dan pola perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sosial. Sosialisasi berlangsung sepanjang hayat dan melibatkan berbagai agen, seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, lembaga keagamaan, dan media massa. Proses ini membentuk kepribadian individu sekaligus memastikan keberlangsungan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan program-program sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menekankan pentingnya pemberdayaan, kemandirian, dan penguatan kapasitas sosial agar masyarakat mampu mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan secara berkelanjutan.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, solidaritas sosial, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Kesadaran kolektif ini tercermin dalam kepedulian sosial, gotong royong, dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan umum. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga ketahanan masyarakat di tengah berbagai krisis dan ketidakpastian global.

Dengan demikian, masyarakat dapat dipahami sebagai entitas sosial yang dinamis, kompleks, dan terus berkembang. Ia tidak hanya terdiri dari individu-individu yang hidup bersama, tetapi juga mencakup sistem nilai, norma, struktur, dan proses sosial yang saling terkait. Pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan, membangun relasi sosial yang harmonis, serta mengembangkan kehidupan bersama yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah realitas pluralisme dan perubahan zaman.

## **2. Tinjauan Tentang Nilai-nilai Pancasila**

### **a. Pengertian Nilai**

Nilai merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial dan humaniora yang merujuk pada standar atau prinsip yang digunakan oleh individu dan kelompok dalam menentukan apa yang dianggap penting, benar, atau pantas dalam kehidupan. Nilai menjadi acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai konteks kehidupan sosial.

Menurut Arifin (2021), nilai adalah keyakinan yang diyakini secara mendalam oleh individu maupun kelompok tentang apa yang baik, benar, dan ideal, yang kemudian memengaruhi perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tidak hanya membentuk orientasi tindakan, tetapi juga menjadi dasar penilaian terhadap tindakan orang lain.

Sementara itu, Fitriyah dan Nuryadi (2020) menyatakan bahwa nilai adalah suatu sistem yang menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai memiliki sifat yang abstrak, namun dapat diinternalisasi dan dimanifestasikan dalam tindakan nyata, sehingga memengaruhi hubungan sosial antarindividu dan kelompok.

Sedangkan menurut Ma'arif (2022), nilai merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi sosial dan proses budaya dalam masyarakat. Nilai mencerminkan pandangan dunia suatu komunitas dan menjadi fondasi dalam membangun identitas kolektif serta menjaga keberlangsungan norma sosial.

Nilai memiliki posisi sentral dalam kehidupan manusia karena menjadi fondasi utama dalam membentuk cara pandang individu terhadap realitas sosial. Sejak seseorang dilahirkan dan mulai berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, proses internalisasi nilai sudah berlangsung secara bertahap melalui keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan institusi keagamaan. Proses ini menjadikan nilai sebagai kerangka acuan yang tidak hanya memengaruhi pilihan tindakan, tetapi juga menentukan sikap moral, etika, serta tanggung jawab sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, nilai berfungsi sebagai pengarah perilaku yang bersifat normatif, yaitu memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sosial.

Nilai juga memiliki keterkaitan yang erat dengan norma sosial. Norma merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Apabila nilai dipahami sebagai konsep ideal dan abstrak, maka norma menjadi aturan praktis yang mengatur perilaku sosial secara lebih spesifik. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma pada hakikatnya mencerminkan penyimpangan terhadap nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, karena keberadaan nilai menjadi dasar legitimasi bagi aturan, hukum, dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif sosiologis, nilai berfungsi sebagai perekat sosial yang

menjaga kohesi dan stabilitas masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesepakatan nilai yang kuat cenderung mampu membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, solidaritas, dan toleransi menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban. Sebaliknya, melemahnya nilai-nilai tersebut dapat memicu konflik sosial, ketidakpercayaan antarindividu, serta disintegrasi sosial. Oleh karena itu, penguatan nilai menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam masyarakat yang bersifat plural dan multikultural.

Nilai juga memiliki dimensi historis dan kontekstual. Artinya, nilai berkembang seiring dengan perubahan zaman, kondisi sosial, serta dinamika budaya masyarakat. Meskipun terdapat nilai-nilai universal yang bersifat relatif tetap, seperti kemanusiaan dan keadilan, namun cara nilai tersebut dipahami dan diimplementasikan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, sistem sosial, serta pengalaman historis yang membentuk identitas kolektif suatu komunitas. Dengan demikian, nilai tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu mengalami proses reinterpretasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Dalam konteks pendidikan, nilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Melalui proses pendidikan yang berorientasi pada nilai, individu diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, empati sosial, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Pendidikan nilai menjadi semakin penting di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa berbagai pengaruh budaya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Nilai juga berperan penting dalam kehidupan beragama. Setiap agama

mengajarkan seperangkat nilai yang menjadi pedoman hidup bagi para penganutnya. Nilai-nilai keagamaan seperti kasih, kedamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam masyarakat yang plural, nilai-nilai keagamaan perlu diaktualisasikan secara inklusif dan dialogis agar dapat memperkuat toleransi serta kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, nilai keagamaan tidak hanya berfungsi dalam ranah spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, nilai memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dan kolektif. Identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis atau struktural, tetapi juga oleh nilai-nilai yang diyakini dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Nilai menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sosial. Pada tingkat kolektif, nilai membentuk identitas kelompok, komunitas, dan bangsa. Identitas kolektif yang kuat dan berakar pada nilai-nilai luhur dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Melalui internalisasi nilai, individu terdorong untuk mengatur perilakunya sendiri tanpa harus selalu diawasi oleh aturan formal. Kontrol sosial berbasis nilai cenderung lebih efektif karena berasal dari kesadaran internal, bukan paksaan eksternal. Ketika nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial telah tertanam kuat, maka individu akan secara sukarela bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang beradab dan beretika.

Nilai juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan nilai, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam konteks kebijakan publik, nilai menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan, prioritas program, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang nilai menjadi penting bagi para pengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkeadilan dan bermoral.

Dalam era modern dan globalisasi, tantangan terhadap nilai semakin kompleks. Arus informasi yang cepat, perkembangan teknologi digital, serta interaksi lintas budaya membawa perubahan signifikan dalam sistem nilai masyarakat. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk pertukaran nilai yang memperkaya kehidupan sosial. Namun di sisi lain, globalisasi juga berpotensi melemahkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya jika tidak disikapi secara kritis. Oleh karena itu, diperlukan upaya sadar untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap nilai-nilai global dan pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi identitas masyarakat.

Nilai juga berkaitan erat dengan etika dan moralitas. Etika merupakan refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat. Melalui etika, nilai diuji, ditafsirkan, dan diterapkan dalam situasi konkret yang sering kali kompleks dan dilematis. Dalam kehidupan sosial yang terus berkembang, refleksi etis menjadi penting agar nilai tidak diterapkan secara kaku, melainkan secara kontekstual dan humanis. Hal ini memungkinkan nilai tetap relevan dan bermakna dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kontemporer.

Dengan demikian, nilai bukan hanya sekadar konsep ideal, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan tatanan masyarakat.

## **b. Karakteristik Nilai**

Nilai merupakan konsep abstrak yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, yang bersumber dari sistem keyakinan dan budaya suatu masyarakat. Karakteristik nilai mencerminkan bagaimana nilai tersebut terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam kehidupan sosial individu dan kelompok.

Menurut Mutakin (2021), nilai memiliki karakteristik yang bersifat normatif, artinya nilai menjadi standar atau acuan bagi individu dalam membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta pantas atau tidak pantas dalam suatu konteks sosial tertentu. Nilai tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberikan arah terhadap tujuan hidup seseorang.

Sementara itu, Nurhayati (2020) menekankan bahwa nilai bersifat relatif dan kontekstual, tergantung pada waktu, tempat, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Artinya, apa yang dianggap sebagai nilai luhur di satu masyarakat belum tentu memiliki makna yang sama di masyarakat lain. Relativitas ini menunjukkan bahwa nilai bukan entitas tetap, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus mengalami pergeseran seiring perubahan zaman dan struktur sosial.

Selain itu, menurut Yulianti dan Wahyuni (2022), nilai memiliki karakteristik integratif dan internalisasi. Nilai cenderung menyatu dalam struktur kepribadian individu dan membentuk pola pikir serta sikap hidup. Nilai yang telah terinternalisasi akan mempengaruhi cara individu merespon situasi sosial dan menentukan pilihan-pilihan moralnya. Hal ini menandakan bahwa nilai tidak hanya menjadi pengetahuan kognitif, tetapi juga menjadi bagian dari identitas diri dan jati diri seseorang dalam masyarakat.

Karakteristik nilai sebagai konsep abstrak juga dapat dipahami melalui fungsinya dalam membangun keteraturan sosial. Nilai berperan sebagai landasan bersama yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Melalui nilai, individu memahami ekspektasi sosial yang melekat pada peran dan statusnya, sehingga tercipta pola perilaku yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, nilai menjadi instrumen sosial yang menjaga keharmonisan, mencegah konflik, serta memperkuat kohesi sosial. Tanpa adanya nilai yang disepakati bersama, kehidupan sosial berpotensi mengalami disorganisasi karena tidak adanya standar bersama yang mengatur perilaku kolektif.

Nilai juga memiliki karakteristik transformatif, yaitu kemampuan untuk membentuk dan mengubah perilaku individu maupun struktur sosial. Nilai tidak hanya diwariskan secara pasif dari generasi ke generasi, tetapi juga dapat direkonstruksi melalui proses refleksi kritis, dialog sosial, serta dinamika perubahan sosial. Proses ini menunjukkan bahwa nilai bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam merespon tantangan globalisasi, modernisasi, dan pluralitas budaya. Dengan demikian, nilai bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga hasil dari proses sosial yang terus berlangsung dan berkembang.

Dalam kehidupan individu, nilai berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing pengambilan keputusan. Ketika individu dihadapkan pada situasi dilema, nilai yang dianut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan yang dianggap paling tepat. Nilai yang kuat dan terinternalisasi dengan baik akan menghasilkan konsistensi antara pemikiran, sikap, dan perilaku. Sebaliknya, lemahnya internalisasi nilai dapat menyebabkan inkonsistensi moral, di mana individu mengetahui standar yang benar namun gagal mewujudkannya dalam tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan nilai tidak hanya terletak pada pemahaman kognitif, tetapi juga pada kedalaman penghayatan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai juga memiliki dimensi afektif yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Individu tidak hanya menerima nilai secara rasional, tetapi juga melalui pengalaman emosional yang membentuk keterikatan terhadap nilai tersebut. Nilai yang diinternalisasi melalui pengalaman bermakna, seperti keteladanan, relasi sosial yang positif, dan praktik nyata dalam kehidupan, cenderung lebih bertahan lama dan berpengaruh kuat terhadap perilaku. Oleh karena itu, proses penanaman nilai tidak dapat dilepaskan dari konteks relasional dan pengalaman hidup individu dalam lingkungan sosialnya.

Dalam perspektif sosial budaya, nilai berfungsi sebagai identitas kolektif yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Nilai mencerminkan pandangan hidup, cita-cita bersama, serta prinsip-prinsip yang dianggap luhur oleh suatu komunitas. Identitas nilai ini menjadi perekat sosial yang memperkuat rasa memiliki dan solidaritas antaranggota masyarakat. Pada saat yang sama, perbedaan nilai antar kelompok dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik melalui sikap saling menghargai dan dialog antarbudaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik nilai menjadi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Nilai juga memiliki karakter historis, yakni terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah suatu masyarakat. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan budaya di masa lalu berkontribusi dalam membentuk sistem nilai yang dianut hingga saat ini. Karakter historis ini menjelaskan mengapa nilai tertentu memiliki makna yang sangat mendalam bagi suatu kelompok masyarakat, karena terkait dengan perjuangan, penderitaan, atau pencapaian kolektif yang dialami bersama. Pemahaman terhadap dimensi historis nilai membantu individu dan masyarakat untuk menghargai nilai sebagai hasil perjalanan panjang, bukan sekadar konsep abstrak yang terlepas dari realitas sosial.

Selain itu, nilai memiliki karakter edukatif karena berfungsi sebagai dasar dalam proses pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses internalisasi nilai yang bertujuan membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Melalui pendidikan, nilai ditransmisikan, ditanamkan, dan dikembangkan agar individu mampu hidup secara bermakna dalam masyarakat. Proses pendidikan nilai tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, dan institusi sosial lainnya. Dengan demikian, nilai menjadi inti dari proses pembentukan manusia seutuhnya.

Nilai juga bersifat hierarkis, artinya nilai-nilai tertentu dianggap lebih penting atau lebih mendasar dibandingkan nilai lainnya. Hierarki nilai ini mempengaruhi prioritas individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, individu mungkin harus memilih antara dua nilai yang saling bertentangan, sehingga hierarki nilai akan menentukan pilihan yang diambil. Karakter hierarkis ini menunjukkan bahwa nilai tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh dan terstruktur.

Dalam masyarakat plural, karakteristik nilai menjadi semakin kompleks karena adanya keberagaman latar belakang budaya, agama, dan sosial. Setiap kelompok membawa sistem nilai masing-masing yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku anggotanya. Kondisi ini menuntut adanya nilai-nilai bersama yang dapat menjadi titik temu, seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai bersama ini tidak menghapus perbedaan, tetapi menjadi landasan untuk hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik nilai menjadi kunci dalam membangun masyarakat plural yang harmonis dan berkeadaban.

Nilai juga memiliki karakter praksis, yaitu diwujudkan dalam tindakan nyata. Nilai tidak memiliki makna yang utuh apabila hanya berhenti pada tataran wacana atau konsep teoritis. Implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari menjadi indikator sejauh mana nilai tersebut benar-benar dihayati dan dijalankan. Dalam konteks ini, konsistensi antara nilai yang diyakini dan perilaku yang ditampilkan menjadi ukuran integritas moral individu maupun kelompok. Ketika nilai diwujudkan secara konsisten, nilai tersebut akan memiliki kekuatan transformasi yang nyata dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, nilai memiliki karakter reflektif karena memungkinkan individu dan masyarakat untuk melakukan evaluasi diri. Melalui nilai, individu dapat menilai apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip moral yang dianut.

Proses refleksi ini penting dalam membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Nilai yang reflektif mendorong individu untuk tidak hanya mengikuti norma secara mekanis, tetapi juga memahami makna di balik norma tersebut dan mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain.

Nilai juga bersifat komunikatif karena disampaikan dan dipelajari melalui interaksi sosial. Bahasa, simbol, tradisi, dan praktik sosial menjadi media utama dalam mentransmisikan nilai. Proses komunikasi nilai ini bersifat timbal balik, di mana individu tidak hanya menerima nilai, tetapi juga menafsirkan dan memaknainya sesuai dengan pengalaman dan konteks sosialnya. Oleh karena itu, pemaknaan nilai dapat bervariasi meskipun nilai yang dianut secara formal sama. Variasi pemaknaan ini menjadi bagian dari dinamika sosial yang perlu dikelola melalui dialog dan pemahaman bersama.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, nilai berperan sebagai fondasi etis yang mengarahkan arah pembangunan agar tidak semata-mata berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada kesejahteraan manusia secara holistik. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab bersama

menjadi prinsip yang memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan berkeadaban. Tanpa landasan nilai yang kuat, pembangunan berisiko mengabaikan dimensi kemanusiaan dan menciptakan ketimpangan sosial.

Dengan demikian, karakteristik nilai mencakup dimensi normatif, relatif, integratif, internalisasi, historis, edukatif, hierarkis, praksis, reflektif, dan komunikatif.

Keseluruhan karakteristik ini menunjukkan bahwa nilai merupakan konsep yang kompleks, dinamis, dan memiliki peran sentral dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nilai tidak hanya membentuk cara berpikir dan bersikap, tetapi juga menentukan arah kehidupan sosial dan kualitas peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya memahami, menanamkan, dan mengaktualisasikan nilai menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan bermartabat.

### **c. Pengertian Pancasila**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kaelan (2021), Pancasila bukan sekadar falsafah hidup bangsa, melainkan juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila lahir dari jati diri bangsa yang terbentuk secara historis dan filosofis, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan bersifat normatif. Sementara itu, Mahfud MD (2020) menjelaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Ia menyebut Pancasila sebagai konsensus nasional yang merepresentasikan keragaman bangsa Indonesia, dan harus diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi slogan kosong.

Dalam pandangan Yudi Latif (2019), Pancasila merupakan basis etik-politik yang menyatukan keberagaman Indonesia dalam bingkai solidaritas kebangsaan. Pancasila menurutnya bukan hanya nilai-nilai yang dipelajari secara kognitif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui partisipasi aktif warga negara dalam menciptakan keadilan sosial, menghormati kemanusiaan, dan menjaga persatuan.

Dengan demikian, Pancasila tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen normatif atau simbol kenegaraan, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memperoleh makna sejatinya ketika diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi tugas kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga pendidikan, institusi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan negara.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti kehilangan substansi nilai dasarnya. Justru, nilai-nilai fundamental Pancasila menjadi pijakan etik yang memungkinkan bangsa Indonesia beradaptasi tanpa tercerabut dari akar identitasnya. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan penetrasi nilai-nilai transnasional, Pancasila berfungsi sebagai filter sekaligus kompas moral dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Pluralitas merupakan realitas objektif bangsa Indonesia yang tidak dapat dihindari. Keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan hidup menjadi ciri khas sekaligus tantangan dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai titik temu yang menyatukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan pentingnya sikap toleran

antarumat beragama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Sementara sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Nilai-nilai tersebut menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada berbagai fenomena sosial kontemporer, seperti meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan konflik berbasis identitas. Dalam situasi demikian, penguatan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal atau simbolik semata, melainkan harus menyentuh dimensi praksis kehidupan masyarakat. Pancasila perlu dihadirkan dalam ruang-ruang sosial yang konkret, termasuk dalam kehidupan keagamaan dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Institusi keagamaan, termasuk gereja, memiliki peran strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Gereja sebagai komunitas iman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembinaan moral, etika, dan tanggung jawab sosial jemaat. Dalam konteks masyarakat plural, gereja diharapkan mampu menjadi agen perdamaian, toleransi, dan persaudaraan lintas iman. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Kristen yang menekankan kasih, keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah.

Peranan gereja dalam penguatan nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan dan kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Melalui khotbah, pendalaman Alkitab, pendidikan jemaat, dan pembinaan rohani, gereja dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan iman. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dapat diintegrasikan dalam pesan-pesan keagamaan sehingga jemaat memahami bahwa pengamalan iman tidak terpisah dari tanggung jawab sebagai warga negara.

Selain itu, keterlibatan gereja dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi wujud konkret dari pengamalan nilai Pancasila. Kegiatan diakonia, pelayanan sosial, kerja sama lintas agama, dan partisipasi dalam program pembangunan masyarakat mencerminkan implementasi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui keterlibatan tersebut, gereja tidak hanya hadir bagi jemaatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas tanpa membedakan latar belakang agama dan budaya.

Penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan jemaat juga berkaitan erat dengan pembentukan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Jemaat gereja yang hidup di tengah masyarakat plural dituntut untuk memiliki kesadaran multikultural dan kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan kelompok lain. Gereja berperan dalam membekali jemaat dengan pemahaman bahwa perbedaan merupakan anugerah yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan bersama.

Dalam konteks demokrasi, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan penting bagi partisipasi aktif warga negara. Gereja dapat mendorong jemaat untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, baik melalui partisipasi politik yang etis maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Nilai musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan menjadi prinsip yang dapat diinternalisasikan melalui pendidikan iman dan praksis kehidupan bergereja.

Lebih lanjut, penguatan nilai Pancasila tidak dapat dilepaskan dari tantangan generasi muda. Perkembangan teknologi digital dan media sosial membawa perubahan signifikan dalam cara berpikir dan berinteraksi. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi penyebaran nilai-nilai positif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan disinformasi, ujaran kebencian, dan radikalisme.

Gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi muda agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi salah satu upaya strategis dalam membentuk pribadi jemaat yang berintegritas dan berkepribadian luhur. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan solidaritas sosial merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang perlu ditanamkan sejak dini. Gereja dapat bekerja sama dengan keluarga dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter tersebut.

Pada akhirnya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memerlukan upaya penguatan yang berkelanjutan dan kontekstual.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila bukanlah tugas yang selesai dalam satu waktu, melainkan proses panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Gereja, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai tersebut di tengah dinamika kehidupan masyarakat plural.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan iman dan praksis sosial, gereja dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Pancasila tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun relasi sosial yang berlandaskan kasih, keadilan, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

#### **d. Sejarah Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak hanya terkait dengan momen-momen penting dalam pembentukan negara, tetapi juga dengan warisan nilai-nilai lokal dan kebudayaan bangsa yang telah berkembang selama berabad-abad. Gagasan tentang Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1945, melainkan merupakan hasil dari suatu proses perenungan dan perumusan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara.

Menurut Yudi Latif (2020), sejarah Pancasila harus dipahami sebagai hasil dari kristalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk adat istiadat, tradisi lisan, hukum adat, maupun kepercayaan religius. Pancasila adalah hasil pencarian identitas nasional yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial telah lama tercermin dalam sistem sosial berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno hanya menggali dan merumuskan nilai-nilai itu secara eksplisit agar dapat dijadikan dasar ideologis dan filosofis bagi Indonesia merdeka.

Kaelan (2021) menambahkan bahwa Pancasila memiliki akar historis yang kuat dalam budaya Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan. Dalam pandangannya, Pancasila tidak dibentuk oleh pemikiran barat atau luar negeri, melainkan berasal dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia sendiri. Ia menyebutkan bahwa proses perumusan Pancasila melalui sidang BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 merupakan momen penting dalam sejarah kebangsaan. Namun, nilai-nilai yang dibicarakan dalam forum tersebut telah hidup dalam struktur sosial masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan-kesultanan di berbagai wilayah.

Lebih lanjut, Ahmad Syafii Maarif (2020) melihat Pancasila sebagai bentuk kompromi ideologis yang cerdas. Dalam situasi politik yang sangat plural dan beragam saat menjelang kemerdekaan, para pendiri bangsa tidak memaksakan satu ideologi tunggal. Sebaliknya, mereka memilih jalan tengah yang moderat, yakni merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat inklusif. Maarif menggarisbawahi bahwa Pancasila adalah refleksi dari semangat kebersamaan dan tanggung jawab untuk membangun bangsa yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga adil dan sejahtera secara sosial.

Sejarah Pancasila juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pada masa awal kemerdekaan. Sofyan (2022) menyatakan bahwa perubahan rumusan Pancasila, khususnya penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, merupakan keputusan strategis untuk menjaga persatuan nasional. Keputusan tersebut diambil dalam suasana krisis, saat berbagai kelompok agama dan etnis tengah membangun kepercayaan terhadap negara baru. Dengan demikian, sejarah Pancasila merupakan sejarah kompromi dan konsensus nasional yang dicapai melalui musyawarah dan dialog.

Dalam kajian historis lainnya, Wijaya (2021) menekankan pentingnya memahami Pancasila bukan sekadar sebagai produk hukum atau politik, tetapi sebagai identitas bangsa. Ia menjelaskan bahwa dalam perjalanannya, Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan ruh dasarnya, yakni keindonesiaan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan.

Perlu juga dicatat bahwa kontribusi Soekarno dalam merumuskan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pemikiran filsafat Timur dan Barat yang ia pelajari. Nurhayati dan Fadilah (2019) menunjukkan bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 memperlihatkan kedalaman intelektual yang menggabungkan semangat nasionalisme, sosialisme, dan religiositas.

Soekarno tidak hanya mengandalkan gagasan ideologis, tetapi juga meresapi kebutuhan sosiologis bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya.

Menurut Sari dan Lestari (2023), Pancasila juga mengalami proses institusionalisasi pasca-kemerdekaan, di mana pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilainya melalui pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta simbol- simbol negara. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Pancasila tidak berhenti pada perumusannya, tetapi terus berkembang sebagai pedoman hidup bangsa. Mereka menekankan pentingnya mengkaji sejarah Pancasila secara kontekstual, agar generasi muda dapat memahami nilai-nilainya tidak secara doktriner, tetapi secara rasional dan aplikatif dalam kehidupan berbangsa.

Dari perspektif pendidikan, Putra dan Suryani (2022) menyatakan bahwa sejarah Pancasila harus diajarkan sebagai narasi kebangsaan yang mengajarkan toleransi, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Mereka menyoroti bagaimana pendidikan Pancasila pada era digital harus dikembangkan dengan pendekatan kritis dan reflektif, agar tidak hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar tertanam sebagai nilai hidup. Dalam konteks ini, sejarah Pancasila menjadi bagian penting dari pembentukan karakter bangsa.

Dalam perkembangan kontemporer, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Rahman (2023) menyatakan bahwa arus globalisasi, radikalisme, dan politik menjadi ancaman serius terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah Pancasila harus diperkuat melalui pendekatan multikultural dan inklusif. Ia menekankan bahwa sejarah Pancasila adalah sejarah perjuangan untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan nasional di tengah perbedaan. Secara keseluruhan, sejarah Pancasila menurut para ahli bukan hanya berkaitan dengan tanggal dan peristiwa perumusan, tetapi juga menyangkut proses panjang pergulatan nilai, dialog

antar kelompok, serta perjuangan politik dan sosial yang melahirkan dasar negara yang kuat. Pancasila adalah simbol konsensus nasional yang lahir dari realitas pluralisme Indonesia. Keberadaannya bukan sekadar teks normatif, tetapi merupakan ekspresi dari semangat gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

#### **e. Nilai Filosofis yang Terkandung dalam Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai pedoman hukum dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan jati diri dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis ini tidak bersifat temporer atau situasional, melainkan bersifat universal, mendalam, dan kontekstual dalam segala bidang kehidupan. Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila mencerminkan pengalaman sejarah, pandangan budaya, dan spiritualitas masyarakat Indonesia yang berakar pada kepercayaan dan kebersamaan dalam keberagaman.

Menurut Kaelan (2021), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan manifestasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah hidup secara historis dan kultural sebelum kemerdekaan. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang lahir dari kebudayaan asli Indonesia, yang kemudian diformulasikan dalam lima sila yang bersifat saling melengkapi dan mengikat. Nilai-nilai ini tidak diciptakan secara apriori oleh para pendiri bangsa, melainkan digali dari realitas kehidupan sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dapat dipahami sebagai dasar filosofis (*philosophische grondslag*) yang memberikan arah dan tujuan hidup bangsa Indonesia.

Nilai pertama yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai spiritualitas yang menjunjung tinggi keberadaan Tuhan

dan nilai-nilai keagamaan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Yudi Latif (2022), nilai ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi Tuhan tanpa mendiktekan bentuk tunggal dari keyakinan tersebut. Hal ini mencerminkan nilai pluralitas dalam keberagaman dan memberi ruang bagi kebebasan beragama yang bertanggung jawab. Pancasila tidak mengarahkan masyarakat kepada suatu agama tertentu, namun memberi pijakan etis bagi semua bentuk keyakinan yang ada di Indonesia.

Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencerminkan nilai humanisme yang menghormati hak dan martabat manusia. Kaelan (2021) menyebutkan bahwa nilai ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan Tuhan. Dalam konteks filosofis, nilai ini merupakan cerminan dari etika universal tentang penghormatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan sosial dan empati terhadap sesama yang menjadi dasar interaksi sosial di Indonesia. Penerapan nilai ini terlihat dalam bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kaum lemah, dan penyelesaian konflik secara damai.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai filosofis mengenai nasionalisme yang inklusif. Persatuan tidak berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan mengakui dan merayakan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Latif (2022) menekankan bahwa dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan, nilai persatuan menjadi dasar kohesi sosial yang mencegah disintegrasi. Nilai ini mencerminkan filosofi persaudaraan (*fraternity*) dalam keberagaman dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mencerminkan nilai demokrasi Pancasila yang bersumber dari tradisi musyawarah. Menurut Ahmad Tafsir (2020), nilai ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan politik harus dilakukan secara kolektif melalui musyawarah dan mufakat, bukan melalui dominasi mayoritas atau kekuasaan tunggal. Tafsir menyatakan bahwa nilai ini memiliki akar kuat dalam budaya lokal seperti rembug desa dan sistem adat, yang menghargai pendapat semua pihak demi mencapai kesepakatan bersama. Dalam perspektif filosofis, nilai ini mencerminkan demokrasi deliberatif yang menempatkan kebijaksanaan, keadilan, dan partisipasi publik sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan distributif yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tafsir (2020) mengemukakan bahwa nilai ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, merata, dan tidak timpang dalam struktur sosial-ekonomi. Dalam kerangka filosofis, nilai ini berakar pada prinsip keadilan Aristotelian, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks Indonesia, nilai ini penting untuk menjawab ketimpangan sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, nilai-nilai filosofis dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistematis. Menurut Mun'im A. Sirry (2023), Pancasila mengandung sistem nilai yang bersifat integratif, di mana nilai Ketuhanan menjadi fondasi moralitas, nilai Kemanusiaan sebagai landasan etika sosial, nilai Persatuan sebagai prinsip politik, nilai Kerakyatan sebagai dasar sistem pemerintahan, dan nilai Keadilan Sosial sebagai tujuan akhir kehidupan berbangsa. Dalam pandangan ini, Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga filosofi hidup (way of life) yang menyeluruh.

Sementara itu, Zainuddin Maliki (2021) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa mengandung dimensi aksiologis yang berorientasi pada tindakan nyata. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan publik. Dalam kehidupan sosial, nilai ini tampak dalam bentuk solidaritas sosial, toleransi, semangat kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam dunia politik dan ekonomi, nilai-nilai ini menghendaki pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Nilai filosofis dalam Pancasila juga menunjukkan watak kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Pancasila menolak liberalisme ekstrem yang menekankan kebebasan individu tanpa batas, maupun komunisme yang menindas hak individu demi negara. Pancasila berada di jalur tengah (the middle path), yang dalam istilah Soekarno disebut sebagai "jalan Indonesia", yakni sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Secara historis, nilai-nilai filosofis Pancasila juga telah teruji dalam berbagai tantangan zaman, mulai dari era kolonial, reformasi, hingga era digital saat ini. Menurut Lestari (2021), tantangan globalisasi dan modernisasi justru memperkuat relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai benteng ideologis bangsa. Di tengah arus informasi yang deras dan budaya asing yang masuk tanpa filter, nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial menjadi penyeimbang dan penuntun dalam kehidupan masyarakat modern. Nilai-nilai ini juga menjadi dasar pembentukan karakter bangsa (nation character building) di tengah kompleksitas dunia global.

Penerapan nilai filosofis Pancasila dalam pendidikan juga menjadi aspek penting. Pendidikan Pancasila bukan hanya menyampaikan isi kelima sila secara kognitif, melainkan juga menanamkan nilai-nilai moral dan etis yang terkandung di dalamnya. Menurut Sulastri (2023), pendidikan Pancasila harus berorientasi pada

pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup aspek religiositas, humanitas, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan.

Dengan demikian, nilai-nilai filosofis dalam Pancasila bukan hanya merupakan dokumen historis atau konsep normatif semata, tetapi merupakan panduan filosofis yang hidup dan dinamis, yang terus relevan dalam membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang beradab, berkeadilan, dan bermartabat. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ini menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun masa depan bangsa yang harmonis dalam keberagaman.

## **B. Menurut Para Tokoh Ahli**

### **1. Martin Luther (Abad Ke 16)**

Martin Luther, sebagai tokoh utama Reformasi Gereja, mengemukakan serangkaian argumen teologis yang menjadi dasar perlawanan terhadap praktik dan ajaran Gereja Katolik Roma pada abad ke-16. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan baik atau pembelian indulgensi. Luther berpegang teguh pada prinsip sola fide (hanya oleh iman), yang menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena jasa manusia.

Selain itu, Luther menegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan beriman adalah Kitab Suci, bukan Paus atau tradisi gereja. Prinsip ini dikenal sebagai sola scriptura, di mana Alkitab diyakini sebagai satu-satunya dasar ajaran iman dan kehidupan Kristen. Oleh karena itu, setiap orang percaya memiliki hak dan tanggung jawab untuk membaca dan menafsirkan Alkitab secara langsung, tanpa harus bergantung pada tafsiran hierarki gereja.

Luther juga mengembangkan konsep imamat semua orang percaya (the priesthood of all believers), yang menyatakan bahwa semua umat Kristen memiliki akses langsung kepada Allah dan dapat melayani-Nya tanpa perantara khusus seperti

Imam atau uskup. Ia menolak struktur kekuasaan rohani yang kaku dan eksklusif, serta mengedepankan peran aktif umat dalam kehidupan gereja.

Kritik Luther yang paling tajam ditujukan kepada praktik penjualan indulgensi. Ia menilai praktik ini sebagai bentuk korupsi rohani dan manipulasi terhadap umat, karena mengajarkan bahwa pengampunan dosa bisa dibeli dengan uang. Kritik ini tercantum dalam 95 dalil yang ditempelkan di pintu Gereja Wittenberg pada tahun 1517, sebuah tindakan yang kemudian dianggap sebagai awal mula Reformasi Protestan.

Luther juga menolak ajaran bahwa Paus adalah kepala gereja di dunia.

Baginya, hanya Kristus yang layak disebut sebagai Kepala Gereja. Oleh sebab itu, segala otoritas gerejawi harus tunduk pada kehendak Kristus yang dinyatakan melalui Kitab Suci. Sebagai bagian dari reformasi liturgi, Luther mengganti penggunaan bahasa Latin dalam ibadah dengan bahasa sehari-hari, sehingga jemaat dapat memahami dan terlibat langsung dalam penyembahan.

Dalam hal sakramen, Luther hanya mengakui dua yang memiliki dasar Alkitabiah, yakni baptisan dan perjamuan kudus. Ia menolak lima sakramen lainnya yang diajarkan oleh Gereja Katolik karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Kristus. Meskipun demikian, ia tetap meyakini kehadiran Kristus secara nyata dalam perjamuan kudus, meskipun tidak dalam bentuk transubstansiasi sebagaimana diajarkan oleh Katolik.

Argumen-argumen Martin Luther tidak hanya memicu perubahan dalam kehidupan gerejawi, tetapi juga membawa dampak besar dalam tatanan sosial dan politik di Eropa. Gerakan Reformasi yang ia pelopori menjadi titik balik dalam sejarah kekristenan dan melahirkan berbagai denominasi Protestan yang terus berkembang hingga hari ini.

Dampak pemikiran Martin Luther tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya Eropa pada abad ke-16. Reformasi Gereja yang dipeloporinya tidak hanya mengguncang struktur internal Gereja Katolik Roma, tetapi juga membuka ruang baru bagi perubahan cara berpikir masyarakat mengenai otoritas, kebebasan hati nurani, dan relasi antara iman dan kehidupan sosial. Kritik Luther terhadap dominasi otoritas gerejawi secara tidak langsung mendorong lahirnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat bahwa kebenaran iman tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga tertentu, melainkan harus diuji berdasarkan Kitab Suci dan akal budi yang tercerahkan oleh iman.

Salah satu kontribusi besar Luther adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Tindakan ini memiliki makna teologis dan sosial yang sangat mendalam. Secara teologis, penerjemahan Alkitab memungkinkan umat Kristen membaca dan memahami firman Tuhan secara langsung tanpa perantara bahasa Latin yang hanya dikuasai kalangan terdidik dan klerus. Secara sosial, langkah ini meningkatkan tingkat literasi masyarakat dan mendorong berkembangnya budaya membaca serta pendidikan. Alkitab tidak lagi menjadi kitab yang eksklusif, melainkan hadir sebagai sumber nilai yang hidup dan membumi dalam kehidupan sehari-hari umat.

Pemikiran Luther juga membawa perubahan signifikan dalam pemahaman tentang hubungan antara gereja dan negara. Meskipun Luther tidak secara eksplisit memisahkan gereja dan negara sebagaimana konsep modern saat ini, ia menegaskan adanya perbedaan peran antara otoritas rohani dan otoritas duniawi. Gereja dipandang bertugas mengurus perkara iman dan keselamatan, sementara negara bertanggung jawab atas ketertiban dan keadilan sosial.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan konsep dua kerajaan (*two kingdoms doctrine*), yang memengaruhi pemikiran politik Kristen di kemudian hari.

Di bidang pendidikan, Luther menekankan pentingnya pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ia percaya bahwa setiap orang Kristen perlu memiliki kemampuan membaca agar dapat memahami Kitab Suci. Oleh karena itu, Reformasi turut mendorong berdirinya sekolah-sekolah umum dan pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak istimewa kaum elit gerejawi, tetapi sebagai sarana pembentukan iman dan karakter masyarakat secara luas.

Reformasi yang dipelopori Luther juga membawa konsekuensi konflik yang cukup serius. Penolakan terhadap otoritas Paus dan ajaran Gereja Katolik memicu ketegangan antara para pendukung Reformasi dan pihak yang mempertahankan tradisi lama. Konflik ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga politis, karena melibatkan para penguasa wilayah yang melihat Reformasi sebagai peluang untuk melepaskan diri dari pengaruh Roma. Akibatnya, Eropa mengalami berbagai konflik bersenjata dan perang agama yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perubahan teologis sering kali berkelindan dengan kepentingan kekuasaan.

Meskipun demikian, Luther sendiri menolak penggunaan kekerasan dalam menyebarkan ajaran Reformasi. Ia menekankan bahwa iman tidak dapat dipaksakan melalui pedang, melainkan harus diterima secara sadar melalui pewartaan firman.

Namun dalam praktiknya, dinamika sosial dan politik pada masa itu sering kali melampaui kendali para tokoh Reformasi, sehingga ajaran Luther kerap dimanfaatkan untuk legitimasi tindakan politik tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran Luther menjadi fondasi bagi lahirnya gereja-gereja Protestan, khususnya tradisi Lutheran. Prinsip-prinsip dasar seperti sola fide, sola scriptura, dan sola gratia menjadi pilar utama teologi Protestan dan terus diwariskan hingga saat ini. Meskipun terdapat perbedaan tafsir di antara berbagai denominasi Protestan, semangat pembaruan dan penekanan pada iman pribadi tetap menjadi ciri khas yang bersumber dari Reformasi Luther.

Selain itu, konsep imamat semua orang percaya memberikan implikasi penting terhadap kehidupan bergereja. Jemaat tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif yang hanya menerima pelayanan, tetapi sebagai subjek aktif dalam pelayanan gereja.

Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk bersaksi, melayani, dan membangun persekutuan. Pandangan ini mendorong partisipasi jemaat dalam berbagai bidang pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja, serta memperkuat dimensi sosial dari iman Kristen.

Dari perspektif etika Kristen, Luther menegaskan bahwa perbuatan baik bukanlah sarana untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari iman yang sejati. Iman yang hidup akan secara alami menghasilkan tindakan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, Reformasi tidak meniadakan perbuatan baik, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang benar sebagai respons atas anugerah Allah. Pemahaman ini memberikan dasar etis yang kuat bagi keterlibatan orang Kristen dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks sejarah gereja, Reformasi Luther juga mendorong Gereja Katolik Roma melakukan pembaruan internal melalui Konsili Trente. Konsili ini menjadi upaya Gereja Katolik untuk menanggapi kritik Reformasi dengan memperjelas ajaran, memperbaiki disiplin klerus, dan menertibkan praktik-praktik yang menyimpang. Dengan demikian, Reformasi Protestan dan

Kontra-Reformasi Katolik sama-sama berkontribusi pada pembaruan kehidupan gereja di Eropa.

Relevansi pemikiran Martin Luther tidak hanya terbatas pada konteks Eropa abad ke-16, tetapi juga memiliki makna bagi kehidupan gereja dan masyarakat modern. Prinsip kebebasan hati nurani, penekanan pada tanggung jawab pribadi dalam beriman, serta kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan rohani tetap aktual di tengah berbagai tantangan zaman. Gereja diharapkan terus melakukan refleksi kritis agar tetap setia pada Injil dan tidak terjebak dalam formalitas atau kepentingan institusional semata.

Dalam konteks masyarakat plural dan demokratis saat ini, warisan pemikiran Luther dapat menjadi inspirasi bagi dialog antariman dan kehidupan bersama yang saling menghormati. Penegasan bahwa iman bersifat personal sekaligus bertanggung jawab secara sosial mendorong umat Kristen untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama yang berbeda keyakinan, tanpa kehilangan identitas iman mereka. Reformasi dengan demikian bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah proses berkelanjutan dalam upaya memurnikan iman dan praksis gereja.

Secara keseluruhan, Martin Luther merupakan tokoh yang membawa perubahan paradigma dalam sejarah kekristenan. Keberaniannya menentang praktik dan ajaran yang dianggap menyimpang, komitmennya pada otoritas Kitab Suci, serta penekanannya pada iman sebagai dasar keselamatan telah membentuk wajah gereja hingga masa kini. Reformasi yang ia pelopori menunjukkan bahwa gereja selalu membutuhkan pembaruan agar tetap relevan dan setia pada panggilannya di tengah dunia yang terus berubah.

## 2. Bambang Noorsena (2012)

Bambang Noorsena adalah seorang teolog Indonesia yang dikenal karena pemikiran-pemikirannya yang menekankan pentingnya kekristenan yang kontekstual dan berakar pada budaya Nusantara. Ia mengembangkan konsep “Kristen Nusantara”, yang bertujuan membangun identitas kekristenan yang tidak bersifat kolonial atau Barat-sentris, melainkan menyatu dengan jati diri bangsa Indonesia. Dalam pandangannya, Injil tidak datang dalam bentuk budaya Barat, tetapi harus dihayati dan diwartakan dalam konteks budaya lokal. Karena itu, gereja dipanggil untuk mengembangkan iman Kristen yang relevan dengan kebudayaan Indonesia tanpa kehilangan esensi Injil.

Bambang juga menekankan bahwa gereja memiliki tanggung jawab sosial dan historis dalam kehidupan bangsa. Ia menolak pandangan bahwa gereja hanya merupakan tempat ibadah semata; sebaliknya, gereja harus terlibat dalam membangun bangsa, memperjuangkan keadilan, dan menjadi pembawa damai di tengah realitas sosial yang penuh perbedaan. Menurutnya, gereja harus menjadi suara kenabian di tengah masyarakat, menyuarakan nilai-nilai moral dan etika yang membela kemanusiaan serta kebenaran.

Dalam kaitannya dengan Pancasila, Bambang menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara nilai-nilai Kristen dan sila-sila dalam Pancasila. Ia menyebut bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang berakar pada nilai-nilai universal yang juga dijunjung tinggi oleh kekristenan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, umat Kristen, khususnya gereja, harus menjadi garda terdepan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bambang, Pancasila adalah bentuk konkret dari nilai-nilai etika publik yang harus diterima dan dihidupi oleh semua agama di Indonesia.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya dialog antaragama sebagai sarana menciptakan harmoni dalam masyarakat pluralis. Gereja, menurutnya, harus membangun hubungan yang terbuka dengan pemeluk agama lain, bukan untuk menyamakan ajaran, tetapi untuk saling memahami dan menciptakan kedamaian. Dalam konteks ini, gereja berperan sebagai perekat sosial yang membawa damai di tengah keberagaman yang rawan konflik. Sikap toleransi, hormat terhadap perbedaan, dan pelayanan lintas batas agama adalah bagian integral dari kesaksian iman Kristen di Indonesia.

Bambang juga menggugah kesadaran umat Kristen akan sejarah kekristenan di Nusantara yang sudah hadir jauh sebelum masa kolonial. Ia mengajak gereja untuk merefleksikan kembali peran kekristenan dalam sejarah bangsa, membebaskannya dari narasi dominasi asing, dan membangun pemahaman yang kuat bahwa kekristenan adalah bagian sah dari warisan bangsa Indonesia.

Dengan pendekatan yang mendalam dan reflektif, Bambang Noorsena menyuarakan pentingnya gereja hadir secara aktif, kontekstual, dan nasionalis dalam masyarakat pluralistik. Baginya, menjadi Kristen di Indonesia berarti menjadi bagian dari solusi bagi bangsa, bukan menjadi kelompok eksklusif yang terasing dari realitas sosial. Pendekatan teologisnya tidak hanya mengakar pada Alkitab, tetapi juga menjembatani nilai-nilai iman dengan semangat kebangsaan.

Pendekatan teologis Bambang Noorsena menempatkan inkulturasi sebagai proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan gereja di Indonesia. Inkulturasi dipahami bukan sebagai kompromi iman atau pencampuran ajaran, melainkan sebagai usaha teologis untuk menerjemahkan pesan Injil ke dalam bahasa, simbol, dan cara berpikir masyarakat lokal. Menurut Bambang, Injil selalu bersifat transkultural, namun pewartaannya tidak pernah lepas dari konteks budaya tertentu.

Dalam kerangka ini, Bambang mengkritik keras model kekristenan yang masih terjebak pada simbol-simbol, liturgi, dan pola pikir Barat secara kaku. Ia menilai bahwa warisan kolonial telah membentuk wajah gereja yang cenderung elitis, berjarak dengan masyarakat sekitar, dan kurang peka terhadap realitas sosial bangsa. Gereja yang terlalu meniru Barat berisiko kehilangan daya transformasinya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, Bambang mendorong gereja untuk melakukan pembaruan teologis yang berani dan reflektif, dengan menjadikan konteks Indonesia sebagai *locus theologicus* atau ruang berteologi yang sah dan bermakna.

Konsep “Kristen Nusantara” yang dikembangkan Bambang juga menegaskan pentingnya identitas nasional dalam kehidupan beriman. Ia berpandangan bahwa iman Kristen tidak boleh dipahami sebagai identitas yang bertentangan dengan keindonesiaan. Sebaliknya, menjadi Kristen yang sejati di Indonesia berarti mencintai tanah air, menghargai sejarah bangsa, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Nasionalisme, dalam pandangan Bambang, bukanlah ideologi yang meniadakan iman, tetapi wadah etis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Injil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk mengembangkan teologi kebangsaan yang sehat, yakni teologi yang tidak terjebak pada politisasi agama, tetapi juga tidak bersikap apolitis. Bambang menolak sikap gereja yang menarik diri dari persoalan publik dengan alasan menjaga kemurnian iman. Menurutnya, iman yang sejati justru harus terlibat dalam pergumulan nyata masyarakat, termasuk persoalan kemiskinan, ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Gereja tidak boleh hanya menjadi penonton dalam sejarah, melainkan harus menjadi agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam ruang publik.

Bambang juga menekankan dimensi profetis gereja dalam konteks bangsa Indonesia. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang kritis terhadap kekuasaan, tanpa kehilangan sikap rendah hati dan dialogis. Suara kenabian ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk mengingatkan bangsa akan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Dalam masyarakat demokratis, peran ini menjadi semakin penting, mengingat adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian terhadap kelompok-kelompok yang lemah dan terpinggirkan.

Dalam relasinya dengan Pancasila, Bambang Noorsena mengembangkan pemahaman yang mendalam dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar konsensus politik, melainkan refleksi nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran moral universal agama-agama, termasuk kekristenan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, dipahami sebagai pengakuan akan dimensi transenden dalam kehidupan manusia, tanpa memaksakan satu ekspresi keagamaan tertentu.

Hal ini sejalan dengan iman Kristen yang mengakui Allah sebagai sumber kehidupan dan moralitas.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam pandangan Bambang, sangat dekat dengan ajaran Kristen tentang martabat manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*). Gereja, oleh karena itu, memiliki tanggung jawab moral untuk membela nilai kemanusiaan, menolak segala bentuk kekerasan, serta memperjuangkan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Demikian pula sila Persatuan Indonesia dipahami sebagai panggilan etis untuk merawat kebersamaan dalam keberagaman, sebuah nilai yang sejalan dengan semangat persekutuan dalam iman Kristen.

Lebih lanjut, Bambang melihat sila Kerakyatan dan Keadilan Sosial sebagai tantangan konkret bagi gereja untuk terlibat dalam proses demokrasi dan pembangunan sosial. Gereja tidak boleh bersikap eksklusif atau hanya memperjuangkan kepentingan internalnya, tetapi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk mendidik umat agar menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas, serta berani menyuarakan kebenaran di tengah arus pragmatisme politik.

Dialog antaragama menjadi salah satu pilar penting dalam pemikiran Bambang Noorsena. Ia menegaskan bahwa pluralitas agama di Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dihindari dan harus disikapi secara dewasa dan teologis. Dialog antaragama tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas iman, tetapi untuk membangun jembatan pemahaman dan kerja sama demi kebaikan bersama. Dalam dialog, setiap agama dipanggil untuk hadir secara autentik, jujur, dan terbuka terhadap perbedaan.

Bambang mengkritik sikap eksklusivisme sempit yang melihat agama lain semata-mata sebagai ancaman. Sikap semacam ini, menurutnya, justru bertentangan dengan semangat Injil yang mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Gereja harus menjadi teladan dalam membangun relasi lintas agama yang sehat, saling menghormati, dan berorientasi pada perdamaian. Dalam masyarakat yang rawan konflik bernuansa agama, peran ini menjadi sangat strategis dan mendesak.

Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya rekonsiliasi historis dalam kehidupan gereja. Ia mengajak umat Kristen untuk merefleksikan kembali sejarah kekristenan di Indonesia secara kritis dan jujur, termasuk keterkaitannya dengan kolonialisme. Dengan memahami sejarah secara utuh, gereja dapat membebaskan diri dari beban masa lalu dan membangun identitas yang lebih otentik sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kesadaran historis ini juga membantu gereja untuk bersikap lebih rendah hati dan

sensitif terhadap luka-luka kolektif yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Pemikiran Bambang Noorsena pada akhirnya menantang gereja untuk keluar dari zona nyaman dan berani melakukan pembaruan yang kontekstual dan relevan. Gereja dipanggil untuk terus belajar dari realitas sosial, budaya, dan politik bangsa, serta menafsirkan kembali iman Kristen dalam terang tantangan zaman. Pembaruan ini bukan sekadar perubahan struktural atau liturgis, tetapi transformasi sikap dan cara pandang yang mendalam.

### 3. Soekarno (1945)

Menurut Soekarno, Pancasila bukan sekadar dasar negara yang bersifat formal, melainkan merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia mengemukakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam pidato monumental pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila merupakan hasil dari perenungan mendalam terhadap kondisi bangsa yang plural, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun tradisi. Karena itu, Pancasila bukanlah suatu ideologi yang diimpor dari luar, tetapi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara.

Soekarno meyakini bahwa Pancasila mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Ia menegaskan bahwa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan dapat menjamin kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghargai. Ia tidak ingin Indonesia menganut satu agama resmi, tetapi mengakui pentingnya nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Soekarno menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi Soekarno, kemerdekaan Indonesia harus berdiri di atas prinsip anti- penindasan dan anti-kolonialisme. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia

harus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, menolak segala bentuk penjajahan, dan menegakkan martabat manusia. Ia juga sangat menekankan persatuan Indonesia sebagai syarat mutlak berdirinya negara, sebab tanpa persatuan, kemerdekaan tidak akan memiliki makna. Bagi Soekarno, bangsa yang besar hanya bisa lahir dari semangat gotong royong dan rasa senasib sepenanggungan.

Dalam pandangan Soekarno, demokrasi yang hidup di Indonesia haruslah demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Ia menolak bentuk demokrasi liberal yang hanya mementingkan suara mayoritas dan mengabaikan suara minoritas. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia, menurut Soekarno, haruslah demokrasi yang berlandaskan kearifan lokal dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Soekarno juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari pembangunan bangsa. Ia ingin agar kemerdekaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Soekarno, keadilan sosial adalah pengejawantahan nyata dari nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi yang dijalankan dengan semangat gotong royong.

Pemikiran Soekarno tentang Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan akibat kolonialisme. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia hidup di bawah penindasan kekuatan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merendahkan martabat manusia. Pengalaman historis tersebut membentuk kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan bukan semata-mata pembebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga pembebasan dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Oleh karena itu, Pancasila dirancang oleh Soekarno sebagai fondasi ideologis yang mampu mencegah terulangnya penindasan dalam bentuk baru, baik oleh kekuatan asing maupun oleh bangsa sendiri. Dalam kerangka ini, Pancasila berfungsi sebagai panduan etis dan moral bagi

penyelenggaraan negara. Soekarno menolak pemisahan antara politik dan moral, karena menurutnya politik tanpa nilai akan melahirkan kekuasaan yang menindas. Pancasila hadir sebagai nilai penuntun agar kekuasaan negara dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite semata. Ia meyakini bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial akan cenderung menyimpang dari tujuan kemerdekaan itu sendiri.

Soekarno juga menegaskan bahwa Pancasila bukanlah konsep yang statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Meskipun nilai-nilainya bersumber dari tradisi dan budaya bangsa, penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai simbol atau slogan, melainkan harus diinternalisasikan dalam sikap, kebijakan, dan tindakan nyata. Tanpa pengamalan yang konsisten, Pancasila akan kehilangan makna substantifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, Soekarno mengembangkan gagasan “Ketuhanan yang berkebudayaan”, yang menekankan toleransi, dialog antaragama, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Ia menolak fanatisme sempit yang dapat memecah belah bangsa. Bagi Soekarno, nilai Ketuhanan harus menjadi sumber etika sosial yang mendorong manusia untuk berlaku adil, jujur, dan berperikemanusiaan. Spiritualitas yang sejati, menurutnya, tidak hanya tercermin dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam kepedulian terhadap sesama dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempati posisi penting dalam pemikiran Soekarno karena berkaitan langsung dengan pengalaman penjajahan. Ia menegaskan bahwa kolonialisme adalah bentuk nyata dari pelanggaran kemanusiaan, karena mengingkari hak-hak dasar manusia. Oleh

sebab itu, bangsa Indonesia yang merdeka harus berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Soekarno bahkan mengaitkan sila kemanusiaan dengan solidaritas global, di mana Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung bangsa-bangsa lain yang masih tertindas.

Persatuan Indonesia, dalam pandangan Soekarno, bukanlah persatuan yang bersifat homogen dan meniadakan perbedaan. Sebaliknya, persatuan yang dimaksud adalah persatuan dalam keberagaman. Ia menyadari bahwa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut justru merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan perbedaan tersebut dalam satu identitas nasional. Tanpa persatuan, Soekarno meyakini bahwa Indonesia akan mudah terpecah dan kembali dikuasai oleh kepentingan asing.

Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Soekarno merumuskan konsep demokrasi yang khas Indonesia. Ia menolak demokrasi liberal Barat yang menurutnya terlalu menekankan individualisme dan kompetisi politik yang tajam. Sebagai gantinya, ia menawarkan demokrasi musyawarah yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi, dalam pandangan Soekarno, bukan sekadar mekanisme pemilihan umum, tetapi proses bersama untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana melalui dialog dan kesepakatan.

Musyawarah dan mufakat dianggap sebagai nilai luhur yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama dalam kehidupan desa. Soekarno melihat praktik ini sebagai bentuk demokrasi asli Indonesia yang harus diangkat ke tingkat nasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa. Ia menekankan bahwa pemimpin yang baik bukanlah mereka yang memaksakan kehendak, melainkan mereka yang mampu mendengar suara rakyat dan mengakomodasi kepentingan bersama.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari keseluruhan sila Pancasila. Soekarno memandang keadilan sosial sebagai tujuan utama dari perjuangan kemerdekaan. Ia mengkritik sistem kapitalisme yang menciptakan kesenjangan sosial dan memperkaya segelintir orang, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan. Menurutnya, kemerdekaan politik tanpa keadilan ekonomi hanyalah kemerdekaan semu. Oleh karena itu, negara harus hadir secara aktif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada kaum lemah.

Konsep keadilan sosial yang dikemukakan Soekarno erat kaitannya dengan prinsip gotong royong. Ia percaya bahwa pembangunan bangsa harus dilakukan secara kolektif, dengan semangat saling membantu dan berbagi. Gotong royong bukan hanya nilai budaya, tetapi juga prinsip ekonomi dan sosial yang menentang individualisme ekstrem. Dalam masyarakat yang berlandaskan gotong royong, keberhasilan tidak diukur dari keuntungan pribadi semata, melainkan dari kesejahteraan bersama.

Soekarno juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Ia meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari kesadaran dan kepribadian rakyat Indonesia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, berkepribadian, dan bertanggung jawab secara sosial. Tanpa pendidikan nilai yang kuat, Pancasila berisiko kehilangan daya hidupnya di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Dalam menghadapi tantangan global, Soekarno tetap menegaskan relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ia tidak menutup diri terhadap pengaruh luar, tetapi menekankan pentingnya sikap selektif dan kritis. Pancasila harus menjadi filter yang menyaring nilai-nilai asing agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa.

Lebih jauh, Soekarno melihat Pancasila sebagai alat perjuangan revolusioner dalam arti moral dan sosial. Revolusi yang dimaksud bukan semata perubahan kekuasaan, tetapi transformasi kesadaran rakyat menuju masyarakat yang adil dan beradab. Pancasila menjadi kompas ideologis yang mengarahkan bangsa Indonesia agar tidak tersesat dalam praktik kekuasaan yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.

Dalam pandangan Soekarno, pengamalan Pancasila menuntut keteladanan dari para pemimpin bangsa. Ia menekankan bahwa pemimpin harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penyelenggaraan negara. Tanpa keteladanan, Pancasila hanya akan menjadi dokumen normatif yang kehilangan daya transformasinya. Oleh karena itu, moralitas pemimpin menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan Pancasila.

Akhirnya, pemikiran Soekarno tentang Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan hasil pemikiran filosofis yang mendalam dan visioner. Pancasila dirancang untuk menjawab tantangan pluralitas, ketidakadilan, dan penjajahan, sekaligus menjadi landasan bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, Soekarno berharap Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, bagi Soekarno, Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kelima sila saling menguatkan dan membentuk satu bangunan ideologis yang utuh. Ia menyebut Pancasila sebagai "*Philosophische Grondslag*", atau dasar falsafah bangsa Indonesia, yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4. Kaelan (2013)

Menurut Kaelan, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang menggambarkan jati diri, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam pandangannya, Pancasila tidak hanya sekadar hasil pemikiran pribadi para pendiri bangsa, melainkan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Pada tahun 2013, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila, Kaelan menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi terbuka, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan substansi dasarnya.

Kaelan menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menolak anggapan bahwa Pancasila hanyalah alat politik semata.

Menurutnya, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang integral, mencerminkan kesatuan antara aspek spiritual, moral, sosial, dan politik yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, seluruh kebijakan dan perilaku politik semestinya merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Kaelan juga melihat Pancasila sebagai bentuk kepribadian bangsa yang tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Menurutnya, segala bentuk ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan mengikis identitas kebangsaan. Pancasila adalah hasil refleksi historis, sosiologis, dan filosofis yang telah mengalami proses panjang, sehingga menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa.

Dengan pendekatan filosofis, Kaelan menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, musyawarah, dan persatuan harus dijadikan

pedoman dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat pluralistik seperti Indonesia, Pancasila menjadi pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan dan mencegah potensi konflik horizontal.

Melanjutkan pemikiran tersebut, Kaelan menempatkan Pancasila dalam kerangka filsafat praktis yang berfungsi sebagai pedoman hidup bersama (common platform) bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai nilai yang harus diwujudkan secara konkret dalam tindakan sosial, kebijakan publik, dan sistem kelembagaan negara. Ia menekankan bahwa tanpa implementasi yang konsisten, Pancasila berisiko direduksi menjadi sekadar jargon normatif yang kehilangan daya transformasinya dalam kehidupan nyata.

Kaelan juga menggarisbawahi bahwa Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berkaitan. Secara ontologis, Pancasila berangkat dari pandangan tentang hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kodrat individu sekaligus sosial. Manusia Indonesia tidak dapat dipahami secara individualistik semata, tetapi selalu berada dalam relasi dengan sesama dan lingkungannya. Pandangan ini tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Secara epistemologis, Pancasila dipandang sebagai sumber pengetahuan normatif yang menjadi dasar dalam merumuskan kebenaran dan kebijakan publik. Menurut Kaelan, kebenaran dalam konteks Pancasila tidak bersifat tunggal dan dogmatis, melainkan terbuka terhadap dialog, musyawarah, dan rasionalitas yang berakar pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan semangat musyawarah mufakat, bukan sekadar

dominasi suara mayoritas yang berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok minoritas.

Dalam dimensi aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan sekaligus ukuran dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kaelan menegaskan bahwa penafsiran terhadap satu sila tidak boleh bertentangan dengan sila lainnya, karena Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang integral dan hierarkis. Dengan demikian, setiap kebijakan negara harus diuji konsistensinya terhadap keseluruhan nilai Pancasila, bukan hanya terhadap satu aspek tertentu.

Lebih lanjut, Kaelan menyoroti pentingnya Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Ia berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pembangunan yang mengabaikan dimensi moral dan sosial berpotensi melahirkan ketimpangan, marginalisasi, dan konflik sosial.

Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari kebijakan ekonomi dan politik.

Dalam bidang pendidikan, Kaelan menekankan urgensi Pendidikan Pancasila sebagai sarana strategis untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran kognitif yang hanya menekankan hafalan sila-sila Pancasila, tetapi harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik.

Internalitas nilai-nilai Pancasila hanya dapat terwujud apabila peserta didik mampu menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Kaelan juga mengkritisi fenomena globalisasi yang membawa arus nilai dan ideologi asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, globalisasi tidak dapat dihindari, namun harus disikapi secara kritis dan selektif. Pancasila berfungsi sebagai filter nilai yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk menerima unsur-unsur positif dari globalisasi, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa kehilangan identitas dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi benteng ideologis yang menjaga kedaulatan budaya dan moral bangsa.

Dalam konteks demokrasi, Kaelan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia haruslah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu tanpa batas. Demokrasi Pancasila menempatkan kebebasan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan moral. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi politik harus diarahkan untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan keadilan sosial, bukan untuk memecah belah bangsa atau mengejar kepentingan kelompok semata.

Selain itu, Kaelan menekankan peran Pancasila dalam menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman merupakan realitas objektif bangsa Indonesia yang tidak dapat disangkal. Dalam pandangannya, Pancasila menyediakan landasan etis dan filosofis untuk mengelola keberagaman tersebut secara harmonis. Nilai toleransi, saling menghormati, dan solidaritas sosial harus menjadi prinsip utama dalam interaksi antarwarga negara.

Kaelan juga menyoroti tantangan internal dalam pengamalan Pancasila, seperti pragmatisme politik, korupsi, dan krisis keteladanan. Ia berpendapat bahwa krisis tersebut bukan disebabkan oleh kelemahan Pancasila sebagai ideologi, melainkan oleh lemahnya komitmen moral para penyelenggara negara dan masyarakat dalam mengamalkannya. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila harus dimulai dari pembenahan moral dan etika publik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Dalam kerangka filsafat hukum, Kaelan menegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus tercermin dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moral. Menurutnya, hukum yang tidak berlandaskan nilai Pancasila berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan tidak mampu mewujudkan keadilan substantif.

Lebih jauh, Kaelan memandang Pancasila sebagai orientasi etis dalam hubungan internasional Indonesia. Dalam percaturan global, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam konteks global, yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia.

Pada akhirnya, Kaelan menegaskan bahwa eksistensi Pancasila sangat bergantung pada kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk terus menghidupkan dan mengamalkannya. Pancasila bukanlah warisan yang bersifat statis, melainkan amanat sejarah yang menuntut tanggung jawab moral setiap generasi. Tanpa upaya sadar untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka ideologi ini berisiko kehilangan makna substantifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, Kaelan memberikan pandangan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol formal negara, melainkan dasar etika dan moral bangsa yang harus terus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

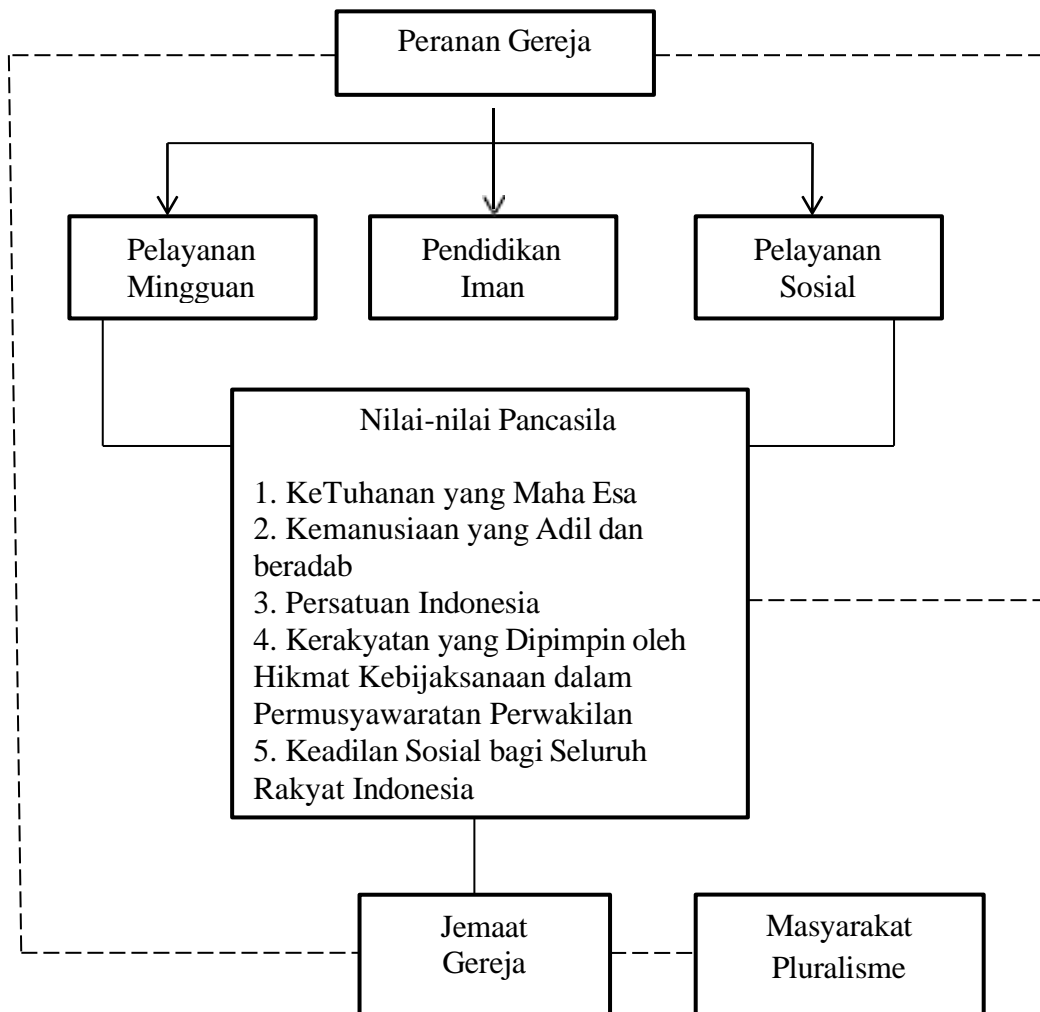
Pendapat ini menunjukkan komitmen Kaelan terhadap pentingnya Pancasila sebagai sistem nilai yang hidup dan membimbing arah pembangunan nasional secara berkelanjutan.

### **C. Kerangka Berpikir**

Moleong (2017), menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan logis dan sistematis yang menunjukkan hubungan antar konsep atau variabel dalam penelitian kualitatif. Kerangka berpikir ini menjadi landasan dalam menjelaskan fenomena sosial yang diteliti, bukan dalam bentuk hipotesis, melainkan narasi konseptual.

Sejalan dengan hal itu, Menurut Sugiyono (2019), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir disusun untuk memberikan arah penelitian, menjelaskan hubungan antarvariabel, serta menggambarkan alur logika dari proses pemecahan masalah yang diteliti.

Dengan demikian, bagan kerangka berpikir berikut disusun untuk menggambarkan hubungan logis antar konsep dan variabel penelitian secara sistematis, serta menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam menelaah peranan gereja dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat ditengah masyarakat pluralisme.

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

#### **D. Kajian Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian tentang peran gereja dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan telah dilakukan oleh berbagai peneliti, dengan hasil yang menunjukkan pentingnya kontribusi lembaga keagamaan dalam membentuk karakter masyarakat yang nasionalis, toleran, dan berwawasan kebangsaan. Salah satu penelitian yang relevan adalah oleh Setiawan dan Dewi (2021) yang meneliti bagaimana gereja dapat meningkatkan kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Peneliti melakukan studi di beberapa gereja di Jawa Tengah dan menemukan bahwa gereja secara aktif menyisipkan pesan-pesan kebangsaan dalam khotbah, pelayanan sosial, dan pendidikan nonformal. Gereja dinilai mampu membina jemaat menjadi warga negara yang cinta damai, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Siburian dan Tambunan (2023) dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* juga menegaskan bahwa nilai-nilai teologis dalam ajaran Kristen, seperti kasih, pengampunan, dan perdamaian, memiliki kesesuaian erat dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan tokoh gereja. Mereka meneliti beberapa gereja di Sumatera Utara dan menyimpulkan bahwa gereja berpotensi besar menjadi agen transformasi sosial bila mampu mengintegrasikan ajaran Alkitab dengan semangat nasionalisme yang dikandung Pancasila. Mereka menekankan bahwa pemahaman teologis yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-politik Indonesia dapat membentuk kesadaran kebangsaan yang kuat dalam diri jemaat.

3. Sementara itu, Tobing dan Hutagalung (2020) meneliti peran gereja dalam pendidikan karakter kebangsaan melalui pendekatan studi kasus. Mereka meneliti sebuah gereja di kota Medan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kegiatan-kegiatan seperti Sekolah Minggu, ibadah keluarga, dan kelompok pemuda gereja menjadi media yang efektif dalam membentuk karakter jemaat. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial ditanamkan secara sistematis melalui pendidikan iman yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Penelitian yang lebih kontemporer dilakukan oleh Nugroho (2023), yang menyoroti bagaimana gereja menghadapi tantangan era digital dengan memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif kualitatif dengan analisis konten digital dan wawancara dengan tim media gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja yang aktif di ruang digital mampu menjangkau generasi muda dan menyampaikan narasi kebangsaan secara menarik dan relevan. Melalui video khotbah, podcast, dan kampanye sosial digital, gereja berhasil membentuk kesadaran kolektif yang positif terhadap nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air.

5. Penelitian lokal yang secara langsung berkaitan dengan GPdI El-Shaddai Purbolinggo dilakukan oleh Wahyuni (2024). Dalam penelitiannya, ia menggunakan pendekatan etnografi mini untuk menelusuri bagaimana gereja ini membina jemaat di tengah masyarakat yang majemuk secara sosial dan agama. Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, wawancara dengan pemimpin gereja dan jemaat, serta dokumentasi kegiatan gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPdI El-Shaddai berhasil menciptakan lingkungan sosial yang harmonis melalui program-program ibadah, pelayanan sosial, dan kegiatan lintas iman yang secara konsisten mengedepankan nilai-nilai kasih, keadilan sosial, dan solidaritas. Gereja ini juga menunjukkan keteladanan dalam membangun hubungan dengan masyarakat sekitar, tanpa membedakan latar belakang kepercayaan atau suku.

6. Kajian terakhir oleh Simandjuntak (2021) memperkuat pentingnya peran lembaga keagamaan sebagai agen ideologis dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan munculnya radikalisme. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kebijakan kebangsaan. Ia menekankan bahwa gereja memiliki otoritas moral yang dapat menjangkau lapisan masyarakat melalui pendekatan spiritual dan etis. Gereja mampu menjadi penjaga nilai-nilai keindonesiaan dan mendorong lahirnya warga negara yang bukan hanya religius secara pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan nasionalisme yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa gereja memiliki kontribusi besar dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang digunakan dalam berbagai studi tersebut, baik melalui pendidikan iman, kegiatan sosial, penggunaan media digital, hingga kerja sama lintas agama, menegaskan bahwa gereja bukan hanya lembaga keagamaan, melainkan juga lembaga sosial yang berperan aktif dalam pembangunan karakter bangsa. Kajian-kajian ini menjadi pijakan penting dalam penelitian mengenai peran GPdI El-Shaddai Purbolinggo, khususnya dalam konteks masyarakat pluralisme, dan memberikan pembenaran akademik terhadap peran gereja sebagai agen pemersatu bangsa.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggali suatu permasalahan secara alami dan mendalam dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Metode harus mampu menjabarkan permasalahan secara sistematis dan saling melengkapi. Pendekatan ini menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran suatu masalah dalam bentuk data-data deskriptif dengan mengedepankan kualitas analisisnya. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:11) "mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati melalui fenomena yang terjadi".

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasi bagaimana Peranan Gereja dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme (studi kasus jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, lampung Timur) melalui Batasan terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam. Pembatasan penelitian dilakukan berdasarkan waktu, tempat, resiko dan dan kemampuan peneliti dalam bidang finansial. Studi deskriptif yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah Peran Gereja dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada jemaat ditengah Masyarakat Pluralisme (studi kasus jemaat di GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, lampung Timur) dengan terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam.

Pencarian dan pengambilan data difokuskan pada data kualitatif dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Di lapangan metode pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber yang sah dan relevan melalui bahan tertulis.

## **B. Informan dan Unit**

Analisis Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah kepenelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi.

menurut Miles & Hiberman yaitu analisis data model interaktif. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga dikenal unit analisis, yang merupakan satu analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Pemimpin GPdI *El-Shaddai*, Jemaat GPdI *El-Shaddai* , dan Masyarakat Sekitar GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur.

(1) Pemimpin GPdI *El-Shaddai*

(2) Jemaat GPdI *El-Shaddai*

(3) Masyarakat Sekitar GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, Lampung Timur

## **C. Jenis Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari Pemimpin Gereja, Jemaat dan dari masyarakat yang masih memerlukan analisa lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara Pemimpin GPdI *El-Shaddai*, Jemaat GPdI *El-Shaddai*, dan Masyarakat sekitar GPdI *El-Shaddai* Purbolinggo, lampung Timur

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, berupa buku, koran, majalah, dokumen pribadi, data arsip dari sekretaris gereja, data arsip dari instansi gereja, dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibatasi atau diteliti dalam skripsi ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah instrumen yang berguna sebagai re-checking terhadap isu/topik permasalahan yang berkembang di masyarakat. Wawancara dilakukan langsung terhadap responden yang mengetahui, berkompeten dan dapat mempertanggungjawabkan kesahihan informasi yang diberikan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan berstruktur. Wawancara mendalam (in-depth) merupakan wawancara yang dilakukan terhadap informan terhadap data yang memiliki potensi meluas/ mengerucut dimana hal tersebut tidak terdapat dalam panduan, sehingga informasi yang menggali menghasilkan data yang tuntas.

Menurut Sugiyono (2012: 211) "berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Sedangkan, wawancara berstruktur adalah wawancara yang sistematis dan berpedoman sehingga pertanyaan tidak melebar pada informasi yang tidak berpotensi berkembang". Wawancara dilakukan terhadap: Peran Gereja dalam Penguatan Nilai-Nilai Pancasila kepada Jemaat di Tengah Masyarakat Pluralisme (Studi Kasus Jemaat di GPdI El-Shaddai).

## **2. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan atau pemantauan langsung terhadap masalah yang diteliti, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan observasi moderat yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam penelitian, sehingga dapat mengamati Peran Gereja dalam Penguatan Nilai-Nilai Pancasila kepada Jemaat di Tengah Masyarakat Pluralisme (Studi Kasus Jemaat di GPdI El-Shaddai Purbolinggo).

Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2012:214) "menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi". Observasi menjadi suplemen pembuktian bagi instrument lain.

Observasi bersifat independen dan alamiah, yang berarti bahwa hasilnya tidak bersifat subjektif, tidak bisa direayasa dan sesuai dengan yang sebenarnya.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang terdokumentasikan dari masa lampau hingga penelitian dilakukan, dapat pula diartikan sebagai pendokumentasian fakta dari berbagai informasi yang diperoleh saat peneliti terlibat di lapangan.

Menurut Sugiyono (2012:213) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademi dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi".

Dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu sifatnya yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplor data lampau untuk mengetahui latar belakang informasi yang diperoleh.

## **E. Uji Kredibilitas Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:244) meliputi:

### **1. Credibility Criteria**

Ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, dan memperlihatkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara melakukan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitiannya dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian dalam tahap ini melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa narasumber yang posisinya berbeda sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan gereja, antara lain:
  1. Pemimpin gereja (pendeta atau gembala) untuk mengetahui strategi dan pendekatan gereja dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pengajaran, khotbah, dan pembinaan rohani.

2. Jemaat dari latar belakang usia, pendidikan, dan pengalaman berbeda guna melihat sejauh mana pengaruh peranan gereja terhadap pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari.
  3. Masyarakat sekitar Gereja Sebagai representasi dari masyarakat luas yang tidak secara langsung terlibat dalam struktur gereja, tokoh-tokoh masyarakat memberikan pandangan dari luar terhadap aktivitas gereja. Data yang diperoleh mencakup penilaian terhadap peran gereja dalam menjaga kerukunan antarumat, kontribusi sosial gereja di tengah masyarakat, serta tanggapan terhadap relasi gereja dengan kelompok masyarakat lain.
- b. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan tidak hanya melalui wawancara, tetapi juga dengan teknik observasi dan dokumentasi, seperti:
1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)  
Wawancara dilakukan kepada para tokoh gereja (pendeta, majelis), jemaat, dan tokoh masyarakat sekitar. Tujuannya adalah menggali pandangan, peran, dan langkah-langkah nyata gereja dalam menanamkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat yang majemuk.
  2. Observasi Partisipatif  
Peneliti terlibat langsung atau hadir dalam kegiatan gereja, seperti ibadah. Observasi ini bertujuan melihat secara langsung bagaimana gereja menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial dalam kehidupan nyata.
  3. Studi Dokumentasi  
Pengumpulan data melalui dokumen resmi gereja seperti notulen rapat, program kerja, khotbah, serta pedoman gereja terkait penguatan nilai kebangsaan. Dokumentasi ini membantu menelusuri konsistensi dan arah kebijakan gereja terhadap nilai-nilai Pancasila.

c. Triangulasi waktu yang dilakukan melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda, baik dengan mengumpulkan bahan referensi maupun mengumpulkan berbagai bahan- bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data.

1. Pra-Kegiatan (Sebelum Program/Kegiatan Gereja Dilaksanakan)

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui perencanaan gereja dan pemahaman awal jemaat terhadap nilai-nilai Pancasila. Data diperoleh dari wawancara dengan pengurus gereja dan jemaat sebelum pelaksanaan kegiatan

2. Saat Kegiatan Berlangsung

Data dikumpulkan selama kegiatan gereja berlangsung, seperti ibadah tematik, pelayanan sosial, atau kegiatan bersama lintas agama. Tujuannya untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan secara langsung oleh gereja dan bagaimana respons jemaat maupun masyarakat sekitar.

3. Pasca-Kegiatan (Setelah Kegiatan Dilaksanakan)

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk melihat dampak dan perubahan yang terjadi pada pemahaman dan sikap jemaat serta persepsi masyarakat. Wawancara ulang dan diskusi reflektif menjadi bagian dari proses ini untuk menilai efektivitas peran gereja secara berkelanjutan.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Tahap Editing

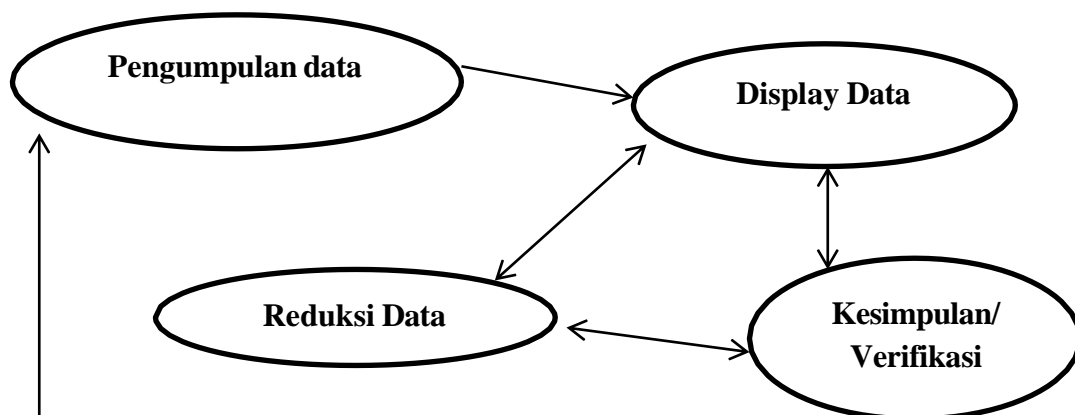
Dalam tahapan ini hasil wawancara yang dapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.

### 2. Tahap Interpretasi

Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini, penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan menarik kesimpulan.

## G. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Analisis Interactive Model dari Miles dan Huberman (1992:20).



Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif

Model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan data dan pengerucutan atas jawaban pertanyaan penelitian.

Miles dan Hiberman (Sugiyono, 2012:137) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun langkah- langkah analisis interaktif tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data bermakna sebagai suatu proses pemilihan, penyaringan, pengorganisasian dan penyederhanaan pada data "kasar" yang diperoleh dari lapangan Proses ini akan memilah data yang akan dijadikan bahasan dalam penelitian, sehingga data yang muncul pada proses ini adalah data yang benar- benar dibutuhkan dalam pembahasan penelitian.

### **2. Penyajian Data (Display Data)**

Setelah data dipilih dan diorganisir, maka langkah selanjutnya adalah data disusun dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penyajian data, informasi yang telah diorganisir disimpulkan berdasarkan kelompok pendapat yang saling menyinergikan sehingga dapat diketahui benang merah dari data lapangan yang diperoleh.

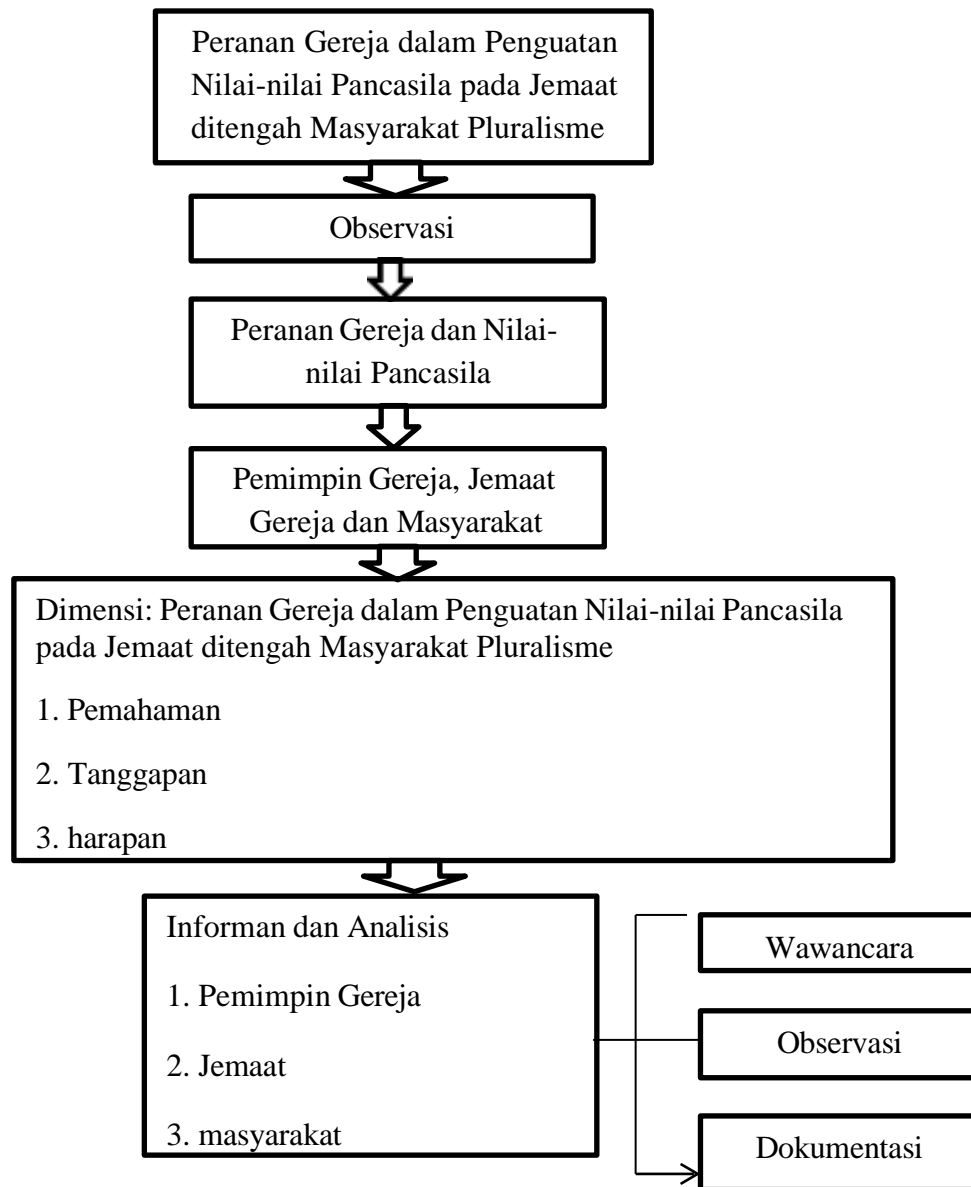
### **3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Menurut pandangan Miles dan Huberman dalam Ibid (1992:20), penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang utuh dan menyeluruh dalam penelitian kualitatif.

Kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian sebenarnya telah dilaksanakan ketika pengambilan data dilapangan dilaksanakan, namun hanya sepiantas dan bersifat subjektif. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan penganalisisan data lapangan tentang arah jawaban penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan seksama dan memakan

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan "intersubjektif" atau temuan pada salinan dan data yang lain. Ringkasnya makna- makna yang timbul dari data harus di uji kebenarannya, kecocokannya, yang merupakan validasinya. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis kajian dijadikan sebagai acuan untuk merekomendasikan saran-saran yang bermanfaat dalam penyempurnaan beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Ditambahkan oleh Sugiyono (2012:137). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

## H. Rencana Penelitian



**Gambar 3 Rencana Penelitian** akan disajikan melalui tabel, berikut tabel rencana penelitian penulis

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gereja memiliki peranan yang sangat strategis dan signifikan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat di tengah realitas masyarakat yang plural dan majemuk. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan yang berfokus pada pelayanan spiritual, tetapi juga berperan sebagai agen pembentukan karakter, moral, dan kesadaran kebangsaan jemaat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang agama, budaya, suku, dan pandangan sosial, gereja hadir sebagai ruang pembinaan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan bersama yang selaras dengan ideologi Pancasila.

Berdasarkan indikator peranan gereja, penelitian ini menyimpulkan bahwa gereja menjalankan perannya secara multidimensional, baik melalui fungsi edukatif, pastoral, sosial, maupun kultural. Melalui pelayanan ibadah mingguan, khotbah, pendalaman iman, dan pembinaan jemaat, gereja secara konsisten menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada penguatan sikap toleransi, keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut tidak disampaikan secara normatif semata, tetapi dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat, sehingga jemaat mampu memahami dan menginternalisasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Gereja juga berperan sebagai ruang dialog dan refleksi bagi jemaat untuk memahami keberagaman sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman. Dalam berbagai aktivitas gerejawi, jemaat diarahkan untuk membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan keyakinan maupun perbedaan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa gereja tidak menutup diri dari realitas pluralisme, melainkan secara aktif membekali jemaat agar

mampu hidup berdampingan secara damai dan konstruktif dengan masyarakat yang berbeda latar belakang.

Selain itu, peranan gereja dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi sarana konkret penguatan nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan jemaat dalam kegiatan bakti sosial, kerja sama lintas agama, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta partisipasi dalam program-program sosial di lingkungan sekitar gereja memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Gereja mendorong jemaat untuk hadir sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Dari indikator nilai-nilai Pancasila, penelitian ini menyimpulkan bahwa gereja berperan efektif dalam menginternalisasikan kelima sila Pancasila dalam kehidupan jemaat. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui penguatan iman yang tidak eksklusif, melainkan terbuka dan menghormati kebebasan beragama. Gereja menanamkan pemahaman bahwa iman kepada Tuhan harus tercermin dalam sikap kasih, penghargaan terhadap martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam ajaran dan praktik gereja yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menumbuhkan empati, serta memperlakukan sesama secara adil tanpa memandang perbedaan latar belakang. Jemaat didorong untuk memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang mengalami keterpinggiran sosial dan ekonomi. Sikap ini memperkuat peran jemaat sebagai agen kemanusiaan di tengah masyarakat plural.

Nilai Persatuan Indonesia diperkuat melalui ajaran gereja yang menempatkan identitas kebangsaan sebagai bagian integral dari identitas iman. Gereja mengajarkan bahwa menjadi umat beriman tidak terpisah dari tanggung jawab sebagai warga negara. Jemaat dibina untuk mencintai tanah air, menjaga

persatuan, dan menolak sikap fanatisme sempit yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Dalam konteks pluralisme, gereja berperan sebagai penjaga nilai persatuan dengan menanamkan semangat kebersamaan dan solidaritas lintas perbedaan.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam budaya dialog dan musyawarah yang dikembangkan dalam kehidupan gereja. Proses pengambilan keputusan dalam gereja yang melibatkan partisipasi jemaat menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang sehat.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan melalui komitmen gereja dalam mendorong jemaat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Gereja tidak hanya menekankan keselamatan individual, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program pemberdayaan dan pelayanan sosial, gereja berkontribusi dalam membangun kesadaran jemaat akan pentingnya keadilan sosial sebagai bagian dari panggilan iman dan nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan gereja dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat di tengah masyarakat pluralisme berlangsung secara berkelanjutan, sistematis, dan kontekstual. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan nilai, pembentukan karakter, dan penguatan kesadaran kebangsaan. Integrasi antara ajaran iman Kristen dan nilai-nilai Pancasila menjadi kekuatan utama gereja dalam membentuk jemaat yang religius sekaligus nasionalis.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui peranan gereja menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan pluralisme, globalisasi, dan potensi konflik sosial. Gereja berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial dengan membekali jemaat agar mampu hidup

berdampingan secara damai, adil, dan bermartabat. Dengan demikian, gereja tidak hanya berperan bagi kehidupan internal jemaat, tetapi juga bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang beriman, humanis, demokratis, bersatu, dan berkeadilan sosial. Peranan gereja dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat di tengah masyarakat pluralisme menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan gereja dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada jemaat di tengah masyarakat pluralisme, serta pembahasan yang telah dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Saran-saran ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan peran gereja sebagai institusi keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan jemaat dan masyarakat secara luas.

1. Bagi pemimpin gereja, Pemimpin gereja memiliki posisi strategis sebagai figur teladan, pengarah, dan pengambil kebijakan dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, pemimpin gereja diharapkan dapat terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dalam setiap aspek pelayanan gerejawi. Integrasi tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian nilai moral dalam khotbah, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan gereja, program pelayanan, serta sikap kepemimpinan yang mencerminkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pemimpin gereja disarankan untuk secara sadar menanamkan pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran iman

Kristen, melainkan sejalan dan saling menguatkan. Melalui pendekatan teologis yang inklusif dan kontekstual, gereja dapat menjadi ruang pembelajaran kebangsaan yang relevan bagi jemaat. Hal ini penting agar jemaat tidak memandang Pancasila hanya sebagai ideologi negara yang bersifat formal, tetapi sebagai nilai hidup yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemimpin gereja diharapkan mampu memperkuat peran gereja sebagai agen pemersatu di tengah masyarakat plural. Dalam konteks keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial, gereja perlu mengambil peran aktif dalam membangun dialog lintas iman, kerja sama sosial, serta kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kepemimpinan gereja yang terbuka dan dialogis akan membantu menciptakan suasana harmonis serta mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan.

Pemimpin gereja juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia gereja, baik pendeta, penatua, maupun pelayan jemaat lainnya, melalui pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan penguatan nilai Pancasila. Dengan demikian, seluruh perangkat pelayanan gereja memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi jemaat gereja diharapkan dapat semakin menyadari perannya sebagai warga gereja sekaligus warga negara. Jemaat tidak hanya dipanggil untuk taat dalam kehidupan beriman, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, jemaat diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Jemaat disarankan untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan gereja yang bertujuan membangun nilai kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial.

Partisipasi aktif dalam ibadah, persekutuan, serta kegiatan sosial gereja menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila. Melalui keterlibatan tersebut, jemaat dapat belajar menghargai perbedaan, mengembangkan sikap gotong royong, serta menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman.

Selain itu, jemaat diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan masyarakat sekitar gereja. Sikap saling menghormati antarumat beragama, keterbukaan dalam berinteraksi sosial, serta kepedulian terhadap permasalahan lingkungan dan sosial merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jemaat hendaknya tidak bersikap eksklusif atau tertutup, melainkan hadir sebagai bagian dari masyarakat yang aktif membangun harmoni sosial.

Jemaat juga disarankan untuk terus meningkatkan literasi kebangsaan dan pemahaman terhadap Pancasila, baik melalui pembelajaran formal maupun informal. Dengan pemahaman yang baik, jemaat dapat menangkal sikap intoleransi, radikalisme, maupun paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan ajaran kasih yang diajarkan gereja.

3. Masyarakat sekitar gereja memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memandang gereja sebagai mitra dalam membangun kehidupan bersama yang rukun dan damai. Perbedaan agama dan keyakinan hendaknya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

Masyarakat disarankan untuk terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan pihak gereja, terutama dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Kerja sama yang baik antara gereja dan masyarakat sekitar akan memperkuat nilai persatuan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Melalui interaksi yang intens dan saling

menghargai, potensi kesalahpahaman akibat perbedaan dapat diminimalisasi.

Selain itu, masyarakat diharapkan mampu mendukung berbagai program gereja yang bersifat sosial dan kemanusiaan, selama program tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Dukungan ini dapat berupa partisipasi langsung, kerja sama lintas komunitas, maupun sikap terbuka terhadap keberadaan gereja sebagai bagian dari masyarakat plural.

Masyarakat juga disarankan untuk bersama-sama menjaga suasana toleransi dan kedamaian dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, keadilan, dan kebersamaan perlu terus dipelihara agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari segi lokasi, subjek, maupun pendekatan metodologis. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada gereja dengan denominasi yang berbeda atau di wilayah dengan tingkat pluralisme yang lebih kompleks, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peranan gereja dalam penguatan nilai-nilai Pancasila.

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan metodologi yang beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), guna melengkapi temuan penelitian kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran empiris yang lebih terukur mengenai efektivitas peran gereja dalam penguatan nilai Pancasila.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami perspektif jemaat lintas usia, seperti generasi muda gereja, untuk melihat bagaimana nilai-

nilai Pancasila dipahami dan diinternalisasi oleh generasi yang berbeda. Hal ini penting mengingat tantangan pluralisme dan kebangsaan ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji peranan gereja dalam konteks digital dan media sosial, mengingat perkembangan teknologi telah memengaruhi cara gereja berkomunikasi dan membina jemaat. Kajian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan peran gereja dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2021). *Pluralisme dan Perdamaian Sosial dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Adha, M. M., Perdana, D. R., & Supriyono, S. (2021). Nilai pluralistik: Eksistensi jatidiri bangsa indonesia dilandasi aktualisasi penguatan identitas nasional. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 10-20.
- Arifin, S. (2020). *Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pluralisme*. Malang: UIN Maliki Press.
- Arifin, Z. (2021). *Pendidikan Nilai dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2022). *Pluralisme dan Integrasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bagir, Z. A. (2021). *Agama dan Keberagaman di Indonesia: Perspektif Pluralisme*. Yogyakarta: CRCS UGM Press.
- Cavanaugh, W. T. (2020). *Field Hospital: The Church's Engagement in a Wounded World*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Edi, S., Astim, R., & Prayoga, B. (2014). PELESTARIAN BUDAYAPIIL PESINGGIRI DALAM MASYARAKAT MULITIKUTURAL LAMPUNG SERTA PENGARUH GLOBALISASI DITINJAU DARI ASPEK KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Civius*, 14(3), 140-160.
- Fitriyah, L., & Nuryadi. (2020). Nilai dalam Konteks Pendidikan Karakter: Telaah Konseptual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 34– 42.
- Halim, A., Mentari, A., & Yanzi, H. (2019). Urgensi mata kuliah umum pendidikan

pancasila dalam menanamkan nilai moral budaya bangsa pada mahasiswa memasuki era revolusi industri 4.0.

- Hidayat, R. (2022). *Transformasi Sosial dan Identitas Masyarakat di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Madani.
- Hidayati, N., & Prasetyo, R. (2021). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Peran Sosial Remaja. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(2), 112–120.
- Hvalvik, R. (2020). *The struggle for Christian identity in the fourth century*. Brill.
- Jenkins, P. (2023). *The next Christendom: The coming of global Christianity* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Kaelan. (2021). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lase, Y. (2023). *Peran Gereja dan Jemaat dalam Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Bina Kasih.
- Latief, A., & Mulyana, D. (2021). *Komunikasi dan Struktur Sosial Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Latif, Y. (2019). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Latif, Y. (2022). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan.
- Lestari, H. (2021). “Relevansi Nilai Pancasila dalam Menghadapi Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 112–121.
- Lexy, J. M. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lindberg, C. (2021). *The European reformations* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Luther, M. (tahun 2008) *Kebebasan seorang C* ((Karya asli diterbitkan tahun 1520)
- Ma’arif, S. (2022). Rekonstruksi Nilai dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 89–102.
- Maarif, A. S. (2020). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Mizan.
- MacCulloch, D. (2020). *Christianity: The first three thousand years*. Penguin Books.
- Madjid, N. (2022). *Pluralisme dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

- Mahfud MD. (2020). *Pancasila: Cita-Cita dan Realitas Konstitusi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Maliki, Z. (2021). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Modern*. Surabaya: Unesa Press.
- Manurung, D. (2020). *Teologi Jemaat dalam Konteks Gereja Lokal*. Bandung: Cahaya Firman.
- Mentari, A., Yanzi, H., & Putri, D. S. (2021). Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 10(1), 1-8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moss, C. (2019). *The myth of persecution: How early Christians invented a story of martyrdom*. HarperOne.
- Mutakin, M. (2021). *Nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Konteks Masyarakat Multikultural*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2019). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Neuman, W. L. (2020). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson Education.
- Noorsena, B. (2012). *Kristen dan Nasionalisme: Iman, Sejarah, dan Identitas Bangsa*. Yogyakarta: Galangpress.
- Nugroho, A. (2023). Digitalisasi gereja dan pendidikan nilai kebangsaan. *Jurnal Transformasi Sosial*, 9(1), 45–60.
- Nugroho, A. (2023). Strategi edukatif gereja dalam membina toleransi antarumat beragama. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 203–214.
- Nugroho, A. R. (2023). *Digitalisasi Gereja dan Tantangan Kebangsaan di Era Media*

- Sosial. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 15(2), 112–125.
- Nurhayati, A., & Fadilah, M. (2019). Pancasila dalam Perspektif Sejarah dan Filsafat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 113–122.
- Nurhayati, D., & Sugihartono, T. (2022). Adaptasi Peran Sosial dalam Era Digital: Studi pada Generasi Muda. *Jurnal Sosioteknologi*, 21(3), 213–225.
- Nurhayati, E. (2020). *Filsafat Nilai dan Pendidikan Moral*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, H., & Suyahmo, T. (2022). Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam Merawat Keberagaman Bangsa. *Jurnal Sosial Politik dan Kewarganegaraan*, 9(1), 55–67.
- Prasetyo, Y., & Suyahmo, S. (2022). Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 25–34.
- Putra, R. D., & Suryani, I. (2022). Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 45–53.
- Rachmawati, L. (2020). Komunikasi Interpersonal dan Implikasinya terhadap Peran Sosial Individu. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 45–56.
- Sanneh, L. (2019). *Beyond Christendom: Globalization, African migration, and the transformation of the West*. Orbis Books.
- Sari, E., & Lestari, Y. (2023). Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 32–47.
- Setiawan, A., & Dewi, M. P. (2021). Peran lembaga keagamaan dalam memperkuat nasionalisme generasi muda. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 150–162.
- Setiawan, R., & Dewi, A. M. (2021). Peran Lembaga Keagamaan dalam Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(3), 345–360.
- Setiawan, R., & Dewi, L. (2021). Peran gereja dalam meningkatkan kesadaran kebangsaan di tengah pluralisme. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 35(2), 122–138.
- Siburian, A., & Tambunan, E. (2023). Integrasi Nilai Kekristenan dan Pancasila dalam Pendidikan Karakter di Gereja. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 8(1), 45–60.
- Siburian, M., & Tambunan, J. (2023). Gereja dan nasionalisme: Studi teologi

- Siburian, R., & Tambunan, D. (2023). Kontribusi gereja dalam pembentukan karakter bangsa di era digital. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 18(1), 44–59.
- Simandjuntak, A. (2021). Pancasila sebagai ideologi integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Politik dan Kebudayaan*, 14(3), 201–218.
- Simandjuntak, M. (2021). Pancasila dan Tantangan Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(4), 198–215.
- Simandjuntak, R. (2021). Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan pluralisme. *Jurnal Kebangsaan*, 9(3), 75–85.
- Simanjuntak, T. (2021). *Kehidupan Jemaat dan Tantangan Era Modern*. Yogyakarta: Pilar Teologi Press.
- Sirry, M. A. (2023). *Pancasila dan Etika Sosial Indonesia*. Jakarta: Gramedia Literasi.
- Soekanto, S. (2020). *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarno. (2020). *Pidato 1 Juni 1945: Lahirnya Pancasila*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulasatri, R. (2023). “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 75–89.
- Tafsir, A. (2020). *Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Negara*. Bandung: Rosda.
- Tobing, B. P., & Hutagalung, S. (2020). Penguatan pendidikan karakter kebangsaan melalui gereja. *Jurnal Moral dan Etika Sosial*, 10(2), 99–113.
- Tobing, J. P., & Hutagalung, M. A. (2020). Integrasi ajaran gereja dan nilai Pancasila dalam pembentukan karakter jemaat. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 15(2), 110–123.
- Tobing, R. & Hutagalung, T. (2020). Sekolah Minggu sebagai Media Pembentukan Karakter Kebangsaan Anak Gereja. *Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 6(2), 89–104.